

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018-2023

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Jl. Drs. H. Shaemoery WS No.1 Desa Sikalang Kecamatan Talawi
Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

Email : Proglap.dinkes@gmail.com

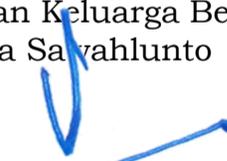


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 dengan penekanan pada pencapaian program prioritas, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDG's). Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB serta berpedoman kepada RPJMD. Renstra juga dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB hingga 5 (lima) tahun mendatang dan merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dengan Kepala Daerah. Oleh Karena itu program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB disusun untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun dengan harapan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2023 ini. Semoga tujuan pembangunan kesehatan di Kota Sawahlunto dapat terwujud dengan dukungan semua pihak.

Sawahlunto, Desember 2021
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sawahlunto


Yasrii, SKM,MM
NIP. 19621222 198406 100 1



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR GRAFIK	iii
	DAFTAR TABEL	iv
	DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	6
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	49
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	63
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota	64
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	65
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	66
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	66
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	273
BAB VIII	PENUTUP	279



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.1 : Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto
- Grafik 3.2 : Pola Musiman DBD menurut Bulan di Kota Sawahlunto
- Grafik 3.3 : Kasus HIV AIDS per Kecamatan di Kota Sawahlunto
- Grafik 3.4 : Kasus HIV AIDS berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto
- Grafik 3.5 : Kasus HIV AIDS berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2002 s/d 2020 di Kota Sawahlunto
- Grafik 3.6 : Prevalensi Gizi Buruk di Kota Sawahlunto
- Grafik 3.7 : Prevalensi Gizi Kurang di Kota Sawahlunto
- Grafik 3.8 : Prevalensi Stunting pada Balita
- Grafik 3.9 : Cakupan D/S dan N/D' di Kota Sawahlunto Tahun 2016 s/d 2020



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Distribusi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kepegawaian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Tabel 2.2	:	Data Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan
Tabel 2.3	:	Prasarana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Tabel 2.4	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Tabel 2.5	:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Tabel 3.1	:	Jumlah Kematian Ibu Kota Sawahlunto
Tabel 3.2	:	Angka Notifikasi Kasus TB / CNR di Puskesmas se-Kota Sawahlunto
Tabel 3.4	:	Distribusi Kasus DBD per Puskesmas se-Kota Sawahlunto
Tabel 3.5	:	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Tabel 3.6	:	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota, Wakil walikota Sawahlunto
Tabel 3.7	:	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat
Tabel 4.1	:	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)
Tabel 4.2	:	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023 (setelah perubahan)
Tabel 4.3	:	Perubahan Tujuan dan Sasaran sebelum dan setelah Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
Tabel 4.4	:	Perubahan Indikator sebelum dan setelah Perubahan RPJMD tahun 2018-2023
Tabel 5.1	:	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum perubahan
Tabel 5.2	:	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan setelah perubahan
Tabel 6.1	:	Capaian Program , Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan 2020 Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto (sebelum perubahan)
Tabel 6.2	:	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021 sampai dengan 2023 Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto (setelah perubahan)
Tabel 7.1	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto (sebelum perubahan)
Tabel 7.2	:	Rencana Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto (setelah perubahan)



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Tujuh (7) Agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu; 1). Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan agenda pembangunan yang tertuang didalam RPJMN tahun 2020-2024 point ketiga, misi kementerian kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas manusia indonesia yaitu memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk indonesia, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Tujuan strategis kementerian kesehatan yang tertuang didalam rencana strategis diantaranya peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan, peningkatan pencegahan penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas, dengan persebaran penduduk dan lingkungan hidup serta dapat meningkatkan kualitas keluarga sehingga menimbulkan rasa tentram menuju masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020- 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”



Dalam Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 (tiga) Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan Kegiatan Prioritas : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk. 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan kegiatan prioritas : Kesejahteraan Sosial 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas : Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat. Sedangkan pada Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter dengan kegiatan prioritas pada Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter. Sebagai penjabaran agenda pembangunan beserta Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagaimana di atas.

Penyusunan Rencana Strategis perubahan didasarkan pada Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Sekaitan dengan itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan dan pembangunan kependudukan dan KB di Kota sawahlunto juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) perubahan. Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang akan dilaksanakan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2018 - 2023 berdasarkan RPJMD tahun 2018. Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto 2018- 2023 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan Kab/Kota dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ada sebelumnya.

Pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

- 1). Pendekatan Partisipatif
- 2). Pendekatan atas-bawah
- 3). Pendekatan bawah-atas



Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto ini telah menyesuaikan dengan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang ditetapkan berdasarkan Perwako No 31 Tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2009-2013 ini berlandaskan pada :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- f. Undang-undang nomor 52 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepada Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;



- m. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19);
- r. Perwako no 31 tahun 2016 Tentang Tupoksi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun untuk menyamakan komitmen dalam rangka mendorong kinerja jajaran kesehatan, keluarga berencana dan peran serta masyarakat serta lintas sector terkait untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota serta menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 adalah :

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Sebagai pedoman bagi jajaran seluruh bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang memuat program dan kegiatan.



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto No 31 Tahun 2016 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian
3. 3 (tiga) Bidang dan 2 (dua) bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi dan 1 (satu) bidang terdiri dari 2 (dua) seksi.

2.1.1 Tugas

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.2.1 Kepala Dinas

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun perencanaan, perumusan kebijakan daerah serta mengkoordinir program kerja kesehatan, pengendalian penduduk dan KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pengelolaan semua upaya urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengelolaan perizinan dan pelayanan umum urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan terhadap rumah umum daerah selaku badan layanan umum daerah dan unit pelaksanaan teknis dinas serta institusi pelayanan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.2.2 Sekretaris

- (1) Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberi pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



- b. Penyiapan proses perizinan dan pelayanan umum urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Penyelenggaraan kebijakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Koordinasi penyusunan kebutuhan tenaga dan peningkatan kompetensi tenaga;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.2.1 Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengkoordinasikan penatalaksanaan umum, kepegawaian dan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan surat masuk, keluar dan protokoler (acara-acara rapat, lomba dinas, dll);



- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pemetaan dan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- e. pengelolaan proses perizinan tenaga kesehatan ;
- f. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan evaluasi, kegiatan PPTK yang berada di bawah Subag Umum dan Kepegawaian;
- h. penyusunan laporan tahunan Subag Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2.2.2 Sub Bagian Administrasi Keuangan Dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok peñatausahaan keuangan dinas dan penyusunan pelaporan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. penyusunan laporan tahunan dinas;
 - c. penyusunan LKJIP dinas;
 - d. penyusunan LPPD dinas;
 - e. penyusunan profil kesehatan;



- f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dan keuangan dinas;
- h. pelaksanaan system informasi kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan / bimbingan teknis program dan keuangan serta pelaporan ke puskesmas dan jaringan;
- j. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.2.3 Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan jiwa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.



2.1.2.3.1 Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi

- 1) Seksi Kesehatan Ibu / Anak / Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program/kegiatan upaya kesehatan ibu, kesehatan anak dan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

2.1.2.3.2 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;



- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.3.3 Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh Kepala Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan, dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan



- imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

2.1.2.4 Bidang Pelayanan, Promosi Dan Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pelayanan, promosi dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan



- kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.4.1 Seksi Pelayanan Kesehatan

- (1) Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi pelayanan kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional pelayanan kesehatan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan;
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



2.1.2.4.2 Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan program promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional program promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.4.3 Seksi Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

- (1) Seksi kefarmasian dan alat kesehatan dipimpin oleh kepala Seksi kefarmasian dan alat kesehatan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok penyiapan kefarmasian dan alat kesehatan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian dan alat kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kefarmasian dan alat kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional kefarmasian dan alat kesehatan;



- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional program kefarmasian dan alat kesehatan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi program kefarmasian dan alat kesehatan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.5 Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader keluarga berencana;



- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kepesertaan ber-kb, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2.1.2.5.1 Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan

- (1) Seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kebijakan teknis seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Melakukan kegiatan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;



- f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan keluarga berencana;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- j. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

2.1.2.5.2 Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh Kepala keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan penggerakan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kebijakan teknis seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis keluarga berencana, kegiatan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. Melaksanakan pelayanan keluarga berencana;



- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-kb;
- f. Melaksanakan kegiatan teknis kegiatan bina keluarga balita;
- g. Melaksanakan kegiatan teknis kegiatan pembinaan ketahanan remaja;
- h. Melaksanakan kegiatan teknis kegiatan bina keluarga lansia dan rentan;
- i. Melaksanakan kegiatan teknis kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- j. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

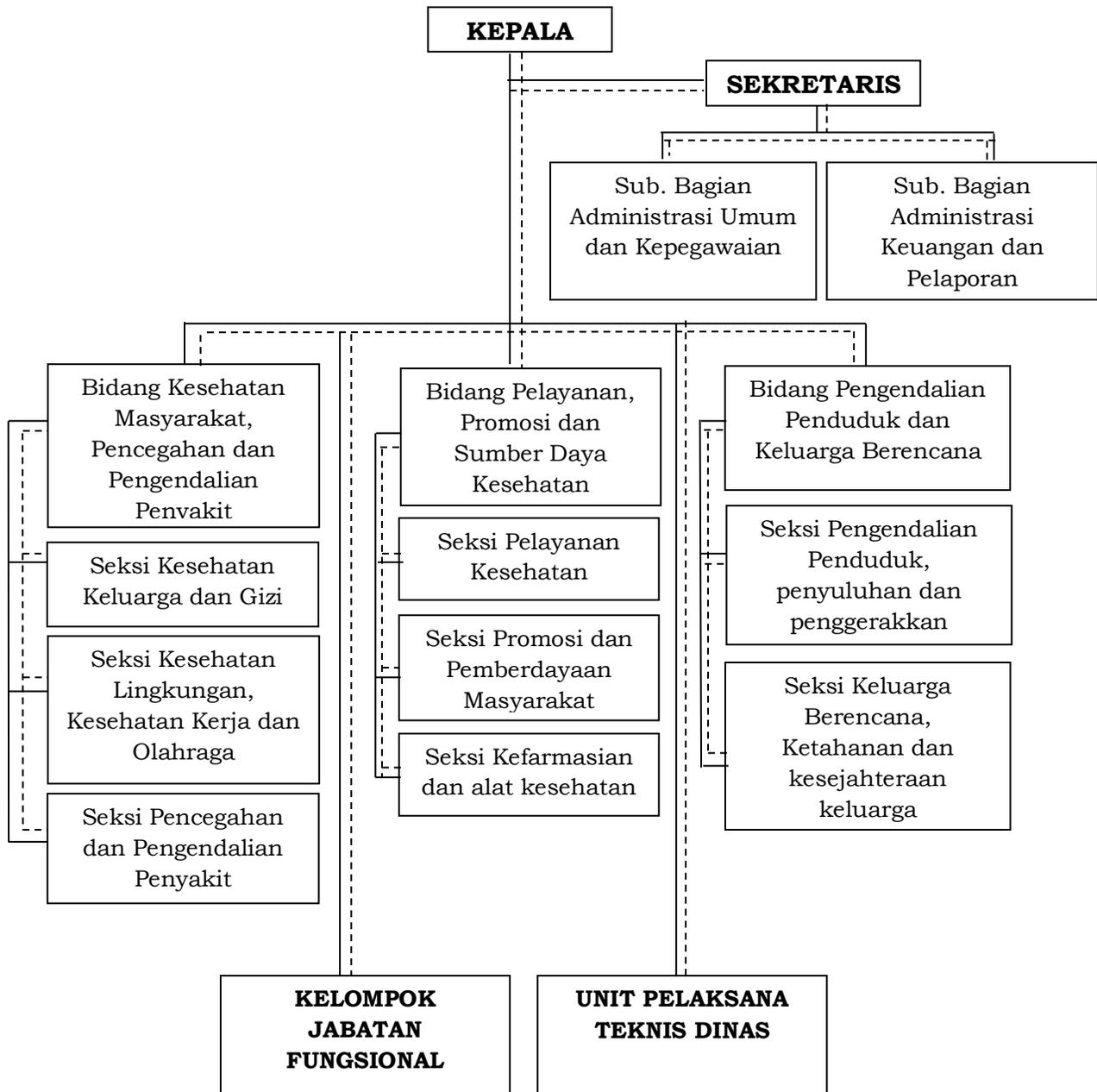
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan
 - b. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional



7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Sumber : Perwako Kota Sawahlunto No. 31 Tahun 2016



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah dan Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kepegawaian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jumlah	Jabatan			Non PNS	Nusantara Sehat
			Struktural	Fungsional			
				Umum	Tertentu		
1.	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	
2.	S2 Kesehatan Masyarakat	4	4	0	0	0	
3.	S1 Dokter Umum	16	1	1	13	1	
4.	S1 Dokter Gigi	7	0	0	5	1	
5.	Perawat						
	a. SPK	0	0	0	0	0	
	b. D III Keperawatan	72	0	4	39	29	
	c. D IV Keperawatan	0	0	0	0	0	
	d. S1 Keperawatan/ Nurse	25	3	0	4	18	
	e. D III Anaestasi	0	0	0	0	0	
6.	Perawat Gigi						
	a. SPRG	0	0	0	0	0	
	b. D III AMKG	7	0	0	4	3	
7.	Bidan						
	a. Sekolah Bidan	3	0	0	3	0	
	b. D 1 Bidan	1	0	0	1	0	
	c. D III Bidan	94	0	1	47	46	
	d. D IV Kebidanan	21	1	4	11	5	
	e. S1 Bidan	0	0	0	0	0	
8.	Kefarmasian						



No.	Pendidikan	Jumlah	Jabatan			Non PNS	Nusantara Sehat
			Struktural	Fungsional			
				Umum	Tertentu		
	a. SMF/SAA	4	0	0	4	0	0
	b. D III Farmasi	15	0	3	11	0	1
	c. S 1 Farmasi	2	0	0	0	2	0
	d. S 1 Apoteker	4	1	0	2	1	0
9.	Kesehatan Masyarakat						
	a. S1 Kesmas / SKM	29	3	3	12	10	1
	b. D III Managemen RS	0	0	0	0	0	0
10.	Sanitarian						
	a. SPPH	1	0	0	1	0	0
	b. D III Kesling	6	0	0	5	1	0
	c. D IV Kesling	5	1	0	4	0	0
	d. S 1 Kesling	1	0	0	1	0	0
11.	Gizi						
	a. SPAG	0	0	0	0	0	0
	b. D III Gizi	14	3	0	9	1	1
	c. D IV Gizi	0	0	0	0	0	0
	d. S 1 Gizi	1	0	0	1	0	0
12.	Keterapian Fisik						
	a. D III Fisio Therapi	2	0	0	0	2	0
13.	Keteknisian Medis						
	a. D III Elektro Medis	1	0	0	1	0	0
	b. D III Rekam Medis	7	0	0	7	0	0
	c. D III Radiografer	0	0	0	0	0	0
	d. D III Analisis Kesehatan	6	0	0	6	0	0
	e. Sakma/Labor	0	0	0	0	0	0
	f. DIII Hyperkes	0	0	0	0	0	0
14.	Non Kesehatan						
	a. SD	5	0	2	0	3	0



No.	Pendidikan	Jumlah	Jabatan			Non PNS	Nusantara Sehat
			Struktural	Fungsional			
				Umum	Tertentu		
b.	SLTP	5	0	0	1	4	0
c.	SLTA	51	0	15	0	36	0
d.	Pekarya Kesehatan	2	1	1	0	0	0
e.	D 1 Umum	0	0	0	0	0	0
f.	D II Umum	2	0	0	0	2	0
g.	D III Umum	0	0	0	0	0	0
h.	S1 Umum	14	4	1	0	9	0
i.	S 2 Umum	2	2	0	0	0	0
Total		429	24	35	192	174	4

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

Data sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Data Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Rumah Sakit Type C	1
2	Puskesmas Rawatan dengan Tempat Tidur	2
3	Puskesmas Non Rawatan	4
4	Gudang Farmasi	1
5	Puskesmas Pembantu	26
6	Pos Kesehatan Kelurahan/Desa	2
7	Polindes	5
8	Posyandu	103
9	Apotek	9
10	Optikal	4
11	Toko Obat	8
12	Laboratorium Klinik	0
13	Kendaraan Roda 4	40



No	Jenis Sarana	Jumlah
14	Kendaraan Roda 2	140
15	Klinik	1

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

Tabel 2.3
Prasarana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Tanah	39			39
2	Sheep Foot/Stamping Roller	7			7
3	Alat Pengolahan Air Kotor Lain-lain	1			1
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	11	2		13
5	Pick Up	3			3
6	Mobil Ambulance	17	1		18
7	Mobil Unit Penerangan	1	1		2
8	Sepeda Motor	88	19		107
9	Perkakas Bengkel	7	2		9
10	Microscope	1	1		2
11	Air Conditioning Unit	1			1
12	Timbangan	3	2		5
13	Lemari Penyimpanan	18	3		21
14	Alat Penyimpanan Lain-lain	1	23		24
15	Alat Laboratorium Lain-lain	6			6
16	Mesin Ketik Lain-lain	6	7		13
17	Lemari Besi	19	7		26
18	Rak	42	2		44
19	Filling Besi/Metal	7	8		15
20	Brand Kas	7			7



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
21	Lemari Kaca	20			20
22	Lemari kayu	51	23		74
23	Papan Visuil	15	3		18
24	Papan Nama Instansi	9	4		13
25	Papan Pengumuman	7	1		8
26	White Board	5			5
27	Mesin Absensi	3	4		7
28	Display	1			1
29	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	54	5		59
30	Genset	14	6		20
31	Mesin Pompa Air	2	1		3
32	Lemari Kayu	20	21		41
33	Rak Kayu	6	4		10
34	Meja Kayu/Rotan	1			1
35	Meja Besi/Metal		2		2
36	Kursi Besi/Metal	29	8		37
37	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3	9		12
38	Kursi Kayu/Rotan/Bambu		4		4
39	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)		3		3
40	Meja Rapat	82	17		99
41	Meja Tulis	35	26		61
42	Meja Makan	7	1		8
43	Meja Reseption	4	2		6
44	Meja Panjang	4			4
45	Kursi Rapat	36	1		37
46	Kursi Tamu	19	12		31
47	Kursi Putar	45	29		74
48	Kursi Biasa	1	1		2



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
49	Bangku Tunggu	23	21		44
50	Meja Komputer	2			2
51	Kasur	34	16		50
52	Tenda	1			1
53	Meja Biro	134	11		145
54	Lemari Pakaian	5	2		7
55	Moubiler Lainnya	1			1
56	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		2
57	Tempat Tidur Busa (Springbad)	1			1
58	Mesin Potong Rumput	4	3		7
59	Kursi Kerja	22			22
60	Lemari Es	16	5		21
61	Gordyn	3			3
62	Mesin Cuci	2			2
63	AC Split	56	17		73
64	Kipas Angin	32	6		38
65	Alat Pendingin Lain-lain		2		2
66	Kompor Gas	3	1		4
67	Tabung Gas	2			2
68	Dispenser		3		3
69	Rak Piring	1	1		2
70	Radio	1			1
71	Televisi	14	6		20
72	Amplifier	8	2		10
73	Sound System	1			1
74	Wireless	28	4		32
75	Microphone Floor Stand		2		2



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
76	Megaphone	3			3
77	Microphone	18			18
78	Camera Video	1	3		4
79	Handy Cam	4	2		6
80	Timbangan Badan	7			7
81	Tangga Alumunium	3			3
82	Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	2		13
83	Alat Pemadam Portable	6	1		7
84	Tandon Air		2		2
85	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	3			3
86	Lampu Sorot	5	1		6
87	Local Area Network (LAN)	1	1		2
88	Personal Komputer Lain-lain	21	3		24
89	P.C Unit/ Komputer PC	40	28		68
90	Lap Top	41	24		65
91	Note Book	20	9		29
92	CPU	1	5		6
93	Hard Disk	8	2		10
94	Printer	59	25		84
95	UPS	28	22		50
96	Harddisk Eksternal	2			2
97	Stabilizer/Stavolt		1		1
98	Memory	2			2
99	Modem	10	2		12
100	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	1		3
101	Meja Kerja	13	1		14
102	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	1		2
103	Buffet Kayu		1		1



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
104	Layar Proyektor	5	1		6
105	Digital		1		1
106	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1			1
107	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	16			16
108	Film Projector	15	6		21
109	Proyektor + Attachment	1			1
110	Slide Projector		1		1
111	Camera Electronic	13			13
112	Handy Talky	5	2		7
113	Video Tape Recorder Portable	1			1
114	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain		1		1
115	Photo Tustel	3			3
116	Loudspeaker	6			6
117	Telephone (PABX)	10			10
118	Antena SHF/Parabola Portable		4		4
119	Handphone	11			11
120	Sterilisator	33	7		40
121	Diagnostik Set	12	8		20
122	Stetoscope	149	11		160
123	Tensi Meter	237	29		266
124	Timbangan Badan	88			88
125	Timbangan Bayi		1		1
126	Instrument Kabinet	39	12		41
127	Gunting Bengkok	2			2
128	Gunting Lurus	21			21
129	Measuring Scale	26			26
130	Two Basin Stand	2	5		7
131	Instrument Dressing Table	20	2		22



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
132	Infusing Stand	20	9		29
133	Strether	7	5		12
134	Bakun Sponge Forceps	2			2
135	Korem Tang	6			6
136	Meja Instumen		6		6
137	Tabung Oksigen	48	2		50
138	ALat Kedokteran Umum Lain Lain	85	29		114
139	Cold Chain	2			2
140	Mini Surgery Set / Minor Set	44	2		46
141	Emergency Set	1			1
142	Nebulizer	11			11
143	EKG	1			1
144	Alat Penghancur Jarum	4	1		5
145	Mesin Penggerus Puyer	1			1
146	Bed Side Cabinet	15	2		17
147	Tiang Infus	5	3		8
148	Lampu Operasi	15			15
149	Tempat Tidur Pasien	19	14		33
150	Oximetri	2			2
151	Suction Pump	4	1		5
152	Dental Unit	11	3		14
153	Dental Chair		2		2
154	X Ray Unit	2			2
155	Alat kesehatan lainnya	1.162	229		1.391
156	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	41	8		49
157	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11			11



No	Nama Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
158	Rumah Negara	40	4		44
159	Instalasi Air Kotor Lain-lain	4			4

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2020, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2020. Adapun pengukuran dilakukan terhadap target sasaran indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahunan tahun 2020. Indikator Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada tidaknya kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah dicapai, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hal ini dapat ditemukan pada satu tahun saja, rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan baik atau kurang baik. Berikut ini tabel 2.1 menggambarkan pencapaian indikator Renstra.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sawahlunto

(tabel bab 7 renstra OPD sebelum perubahan dan indikator lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan)

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN								
					2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Angka usia harapan hidup (AHH)				69.49	69.59	100.14	69.83	69.87	100.06	70.47	70.00	99.33
2	Keluarga Sehat Meningkat				27	24	88.89	29	24.6	84.83	31	24	77.42
3	Jumlah Kematian Ibu				1	0	-	0	3	-	0	2	-
4	Angka Kematian Balita				2.51	23.7	-	2.35	27.1	-	2.17	21.6	-
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun				28	18.6	-	28	7.7	-	26.8	5.3	-
6	prevalensi balita gizi kurang				11.1	8.5	-	11	8.2	-	10.9	9.4	-
7	Persentase ibu hamil kurang energi kronik				18.25	9.7	-	18.2	9.7	-	18.15	12.5	-
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Faskes				84	74.8	89.05	85	75.5	88.82	86	76.6	89.07



9	Persentase cakupan keberhasilan pengobatan pasien TB/suces rate (SR)				90	84.2	93.56	90	75	83%	90	76.3	84.78
10	Prevalensi HIV				< 0.5	-	-	< 0.5	-	-	< 0.5	-	-
11	Persentase imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi 0-11 bulan				95	68	71.58	95	76.3	80.32	95	59	62.11
12	Persentase sekolah yang melaksanakan kawasan tanpa rokok (KTR)				55	-	-	60	-	-	65	-	-
13	Prevalensi hipertensi				35	-	-	34.5	-	-	34	-	-
14	Prevalensi diabetes melitus				5	-	-	4.5	-	-	4	-	-
15	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang ditangani				100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Prevalensi kasus DBD				29	-	-	29	-	-	29	-	-
17	Persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara				50	46.1	92.2	50	10	20	50	5.67	11.34
18	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)				90	90	100.0	92	90.2	98.0	94	94.5	100.5
19	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)				77	85	110.4	78	92.2	118.2	81	91	112.3



20	Persentase sarana produksi makanan yang sesuai standar				90	90	100.0	91	90.95	99.9	91	88	96.7
21	Persentase sarana distribusi obat dan makanan sesuai standar				90	70	77.8	91	90.2	99.1	91	88.5	97.3
22	Peningkatan kualitas UKBM Aktif				73	-	-	75	-	-	77	-	-
23	Persentase Rumah Tangga persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan				84	74.8	89.05	85	75.5	88.82	86	76.7	89.19
24	Persentase rumah tangga bayi dengan asi eksklusif				50	82.9	165.80	50.5	87.2	172.67	51	84.8	166.27
25	Persentase rumah tangga menimbang balita setiap bulan				80	75.5	94.38	80	67.5	84.38	81	62.7	77.41
26	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih				90	72.69	80.77	92	65.2	70.87	94	68.8	73.19
27	Persentase rumah tangga cuci tangan pakai sabun				60	59.76	99.60	63	59.29	94.11	66	66.46	100.70
28	Persentase rumah tangga menggunakan jamban sehat				85	67.2	79.06	86	63.4	73.72	87	64.25	73.85
29	Persentase rumah tangga melakukan pemberantasan jentik nyamuk				64.2	64.26	100.09	66	58.68	88.91	69	62.17	90.10
30	Persentase rumah tangga makan buah dan sayur setiap hari				60	60.6	101.00	62	60.78	98.03	64	65.87	102.92
31	Persentase rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik secara				71.4	69.79	97.75	73	63.95	87.60	75	67.79	90.39



	rutin												
32	Persentase rumah tangga yang tidak ada anggota keluarga yang merokok				35.7	35.73	100.08	40	38.24	95.60	45	35.39	78.64
33	Persentase Penduduk Yang memiliki jaminan Kesehatan				95	95	100.00	95	95	100.00	96	96	100.00
34	Persentase puskesmas yang terakreditasi				100	100	100.00	100	100	100.00	100	0	0.00
35	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar				71	70	98.6	73	71.63	98.12	75	74	98.7
36	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas				98,7	-	-	86	-	-	89	-	-
37	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar				93	82.4	88.6	94	84.23	89.6	95	92.6	97.5
38	Persentase PUS yang menggunakan alat kontrasepsi				65.8	78.65	119.5	65.82	77.05	117.06	66.88	73.04	109.21
39	Persentase peserta KB baru				23.51	7.15	30.4	19.31	9.79	50.70	17.53	9.99	56.99
40	Angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun				2.69	2.3	-	2.38	2.23	-	2.33	2.027	-



Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2013-2018, dari 40 indikator kinerja pelayanan ada beberapa indikator yang belum mencapai target seperti:

1. Prevalensi Gizi Kurang

Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatkan gizi kurang dikota sawahlunto, hal ini dikarenakan faktor pandemi Covid 19 sehingga ibu balita tidak membawa anaknya untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang ke posyandu selain itu juga dipengaruhi oleh pola pemenuhan nutrisi anak, faktor sosial dan ekonomi keluarga.

2. Persentase Imunisasi lengkap bayi 0-11 bulan

Menurunnya persentase Imunisasi Dasar lengkap dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, faktor pandemi Covid 19 yang terjadi menyebabkan keluarga menunda pemberian imunisasi pada anaknya, bahkan masih ada keluarga yang menolak pemberian imunisasi pada anaknya dikarenakan faktor sosial dan agama keluarga.

3. Persentase Rumah Tangga yang menimbang

Menurunnya balita yang ditimbang di Posyandu disebabkan oleh faktor pandemi Covid 19 yang menyebabkan keluarga tidak membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan.

4. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Akreditasi yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali tidak dilakukan pada tahun ini dikarenakan pandemi Covid 19.



Tabel. 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Sawahlunto

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
PENDAPATAN	3,109,962,700	3,494,469,430	3,643,598,600	3,285,107,119	3,864,479,454	3,568,536,325	105.63	110.59	97.94	17,787,863,333	9,447,640,200
A. RETRIBUSI PASIEN UMUM	465,387,300	511,926,030	511,928,030	694,617,000	518,014,000	192,589,000	149.26	101.19	37.62	110.00	27.73
1. PUSKESMAS TALAWI	253,746,000	279,120,600	279,120,600	351,761,000	278,711,500	94,006,000	138.63	99.85	33.679	110.00	26.72
2. PUSKESMAS KOLOK	23,868,000	26,254,800	26,254,800	56,009,000	34,380,000	14,986,000	234.66	130.95	57.079	110.00	26.76
3. PUSKESMAS SEI DURIAN	18,033,300	19,836,630	19,838,630	58,994,000	21,674,000	25,065,000	327.14	109.26	126.344	110.01	42.49
4. PUSKESMAS LUNTO	12,600,000	13,860,000	13,860,000	37,144,000	10,067,000	9,320,000	294.79	72.63	67.244	110.00	25.09
5. PUSKESMAS KP. TELENG	32,040,000	35,244,000	35,244,000	54,360,000	34,263,000	25,479,000	169.66	97.22	72.293	110.00	46.87
6. PUSKESMAS SILUNGKANG	125,100,000	137,610,000	137,610,000	136,349,000	138,918,500	23,733,000	108.99	100.95	17.247	110.00	17.41
B. JKN	2,644,575,400	2,982,543,400	3,131,670,570	2,590,490,119	3,346,465,454	3,375,947,325	97.95	112.20	107.800	118.42	130.32
1. PUSKESMAS TALAWI	964,593,800	1,082,529,800	1,136,656,290	754,096,444	1,017,942,504	1,072,512,250	78.18	94.03	94.357	117.84	142.22
2. PUSKESMAS KOLOK	331,911,800	354,087,800	371,792,190	294,467,150	426,533,400	366,197,500	88.72	120.46	98.495	112.02	124.36
3. PUSKESMAS SEI DURIAN	362,263,000	424,543,000	445,770,150	481,520,950	532,298,325	539,421,450	132.92	125.38	121.009	123.05	112.02
4. PUSKESMAS LUNTO	248,281,000	277,585,000	291,464,250	275,528,100	328,882,750	354,276,825	110.97	118.48	121.551	117.39	128.58
5. PUSKESMAS KP. TELENG	321,103,200	368,191,200	386,600,760	317,652,125	412,704,050	416,905,500	98.93	112.09	107.839	120.40	131.25
6. PUSKESMAS SILUNGKANG	416,422,600	475,606,600	499,386,930	467,225,350	628,104,425	626,633,800	112.20	132.06	125.481	119.92	134.12
										0	0



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

										0	0
BELANJA DAERAH	51,068,065,958	66,254,207,725	77,307,973,873	46,323,449,813	53,880,112,305	71,249,952,915.82	90.71	81.32	92.16	-1,624,960,891,394	-1,472,865,040,851
BELANJA TIDAK LANGSUNG	20,067,622,245	23,203,278,781	23,539,114,037	19,359,234,153	22,500,303,076	22,938,866,252	96.47	96.97	97.45	-645,381,627,463	-622,368,938,848
BELANJA LANGSUNG	31,000,443,713	43,050,928,944	53,768,859,836	26,964,215,660	31,379,809,229	48,311,086,664	86.98	72.89	89.85	-979,579,263,931	-850,496,102,003
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4,552,611,720	3,621,072,500	3,567,369,500	4,240,918,050	2,582,568,133	3,248,181,946	93.15	71.32	91.05	-148,186,354,500	-138,115,753,054
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1,500,000	1,500,000	1,545,000	1,420,500	1,465,000	1,350,000	94.70	97.67	87.38	-48,455,000	-46,000,000
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	358,953,460	171,600,000	163,800,000	333,355,099	147,821,765	142,624,523	92.87	86.14	87.07	-11,801,315,333	-10,969,212,110
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	14,000,000	16,327,000	23,239,000	13,989,800	15,817,000	22,223,950	99.93	96.88	95.63	-443,427,667	-444,102,717
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27,986,538	30,000,000	28,493,000	27,977,200	29,925,500	28,486,700	99.97	99.75	99.98	-904,391,600	-904,086,633
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	46,442,402	47,470,000	18,434,000	46,021,321	47,393,000	18,400,880	99.09	99.84	99.82	-1,529,646,067	-1,515,643,153
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14,101,000	6,102,500	9,527,500	14,098,300	6,046,700	9,474,300	99.98	99.09	99.44	-460,505,833	-460,469,033
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	500,000			500,000			100.00				
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9,248,320	3,560,000	1,200,000	7,600,000	3,200,000	1,200,000	82.18	89.89	100.00	-307,077,333	-252,133,333
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21,180,000	23,998,000	22,847,500	18,472,150	21,702,450	21,324,975	87.22	90.43	93.34	-683,152,500	-594,413,358
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	190,000,000	185,500,000	92,968,500	187,358,680	178,451,718	92,736,118	98.61	96.20	99.75	-6,240,364,833	-6,152,553,215
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PEGAWAI NON PNS	3,429,800,000	2,818,575,000	2,893,945,000	3,151,900,000	1,825,500,000	2,626,153,400	91.90	64.77	90.75	-111,432,721,667	-102,437,179,933
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG	437,900,000	301,440,000	306,220,000	437,250,000	290,390,000	279,137,100	99.85	96.33	91.16	-14,290,446,667	-14,295,862,900
PENYEDIAAN DOKUMENTASI DAN DEKORASI	1,000,000	15,000,000	5,150,000	975,000	14,855,000	5,070,000	97.50	99.03	98.45	-28,183,333	-27,430,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,304,010,000	1,648,607,500	895,302,500	1,195,990,452	1,454,259,975	879,457,701	91.72	88.21	98.23	-42,571,697,500	-38,986,890,699
PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	5,000,000	159,980,000	40,000,000	4,945,000	153,196,000	39,638,500	98.90	95.76	99.10	-126,666,667	-125,194,833
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		16,411,000	7,500,000		16,411,000	7,480,000	0.00	100.00	99.73	7,500,000	7,480,000



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	20,000,000	10,000,000		19,695,000	9,900,000		98.48	99.00	-	-666,666,667	-656,500,000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35,000,000	35,000,000		34,181,550	23,556,700		97.66	67.30	-	-1,166,666,667	-1,139,385,000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1,155,620,000	1,044,096,500	821,802,500	1,049,448,902	895,328,775	806,476,701	90.81	85.75	98.14	-37,698,864,167	-34,175,153,366
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	35,000,000	50,120,000	16,000,000	34,358,000	25,072,000	15,902,500	98.17	50.02	99.39	-1,150,666,667	-1,129,364,167
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	53,390,000	33,000,000	10,000,000	53,362,000	32,999,500	9,960,000	99.95	100.00	99.60	-1,769,666,667	-1,768,773,333
PEMBANGUNAN/REHABILITAS SARANA KESEHATAN/SARANA PENUNJANG/GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS		300,000,000	-		297,796,000	-	0.00	99.27	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32,238,352	112,000,000	-	30,630,375	62,770,152	-	95.01	56.04	-	-1,074,611,733	-1,021,012,500
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	24,142,000	100,000,000	-	23,323,000	55,770,152	-	96.61	55.77	-	-804,733,333	-777,433,333
PERTEMUAN TIM PENILAI KREDIT POINT DAN TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	8,096,352	12,000,000	-	7,307,375	7,000,000	-	90.26	58.33	-	-269,878,400	-243,579,167
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	200,000,000	250,000,000	148,633,000	197,483,562	230,600,936	128,658,941	98.74	92.24	86.56	-6,518,033,667	-6,454,126,459
PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	200,000,000	250,000,000	100,000,000	197,483,562	230,600,936	99,919,341	98.74	92.24	99.92	-6,566,666,667	-6,482,866,059
Distribusi obat dan e-logistik (DAK Non Fisik BOK)		-	48,633,000			28,739,600	0.00		59.09		
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI/STATISTIK DAERAH	71,071,000	39,552,900	-	-	35,776,975	-	0.00	90.45	-	-2,341,726,333	-
PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAERAH	51,159,000	20,790,900	-		17,420,875		0.00	83.79	-	-1,693,500,000	-
PENDATAAN KELUARGA	19,912,000	18,762,000	-		18,356,100		0.00	97.84	-	-648,226,333	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	99,976,470	164,175,500	27,307,000	95,099,225	145,310,050	24,732,000	95.12	88.51	90.57	3,771,791,750	-3,145,242,167



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

PEMBINAAN DAN TEMU PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK) REMAJA KELOMPOK	57,518,420	47,960,000	11,800,000	53,022,475	39,828,850	11,002,500	92.18	83.05	93.24	-1,910,140,667	-1,756,413,333
PEMBINAAN DAN JAMBORE SAKA KENCANA	42,458,050	47,118,000	15,507,000	42,076,750	36,766,500	13,729,500	99.10	78.03	88.54	-1,364,268,333	-1,388,828,833
PEMILIHAN DUTA GENRE TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO		69,097,500			68,714,700		0.00	99.45	-	7,028,700,750	-
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11,746,471,316	20,552,462,695	7,104,340,750	10,609,621,936	18,152,929,872	6,563,940,466	90.32	88.32	92.39	-391,533,543,867	-347,090,124,067
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	17,190,000	20,000,000		15,390,841	7,338,000		89.53	36.69	-	-573,000,000	-513,028,033
PELAYANAN KESEHATAN PESEERTA JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO (JKSS/JAMKESDA)	2,877,998,475	4,089,932,000		2,204,945,726	4,072,945,600		76.61	99.58	-	-95,933,282,500	-73,498,190,867
PELAYANAN KESEHATAN PESEERTA PBI JAMINAN KESEHATAN KOTA SAWAHLUNTO	4,861,832,835	7,618,519,000		4,657,444,471	7,073,496,876		95.80	92.85	-	-162,061,094,500	-155,248,149,033
PEMILIHAN PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN	19,776,050	15,922,600		19,209,050	13,922,600		97.13	87.44	-	-608,201,667	-640,301,667
PELATIHAN PENANGGULANGAN KEGAWATDARURATAN BAGI PETUGAS KESEHATAN	41,156,456	30,000,000		41,156,456	24,150,000		100.00	80.50	-	-1,371,881,867	-1,371,881,867
PENYELENGGARA SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (UNIT)		18,590,000	51,000,000		14,405,400	46,854,340	0.00	77.49	91.87	51,000,000	46,854,340
PENUNJANG PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA		-			-		0.00	-	-	-	-
PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN / BOK (DAK NON FISIK)	3,894,807,000	3,911,458,000	7,028,700,750	3,640,571,617	3,590,018,922	6,498,920,376	93.47	91.78	92.46	-122,798,199,250	-114,853,466,857
PELAYANAN KESEHATAN PADA HARI LIBUR LEBARAN	10,000,000	9,446,300	15,500,000	8,231,000	8,546,300	10,942,300	82.31	90.47	70.60	-317,833,333	-263,424,367
PELAYANAN KESEHATAN EVENT NASIONAL	14,560,000	18,000,000	2,000,000	14,553,000	17,903,475	700,350	99.95	99.46	35.02	-483,333,333	-484,399,650



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS TALAWI	-	1,568,869,680	-	-	965,002,792	-	0.00	61.51	-	-	-
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS SILUNGKANG	-	812,981,175	-	-	628,040,368	-	0.00	77.25	-	-	-
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS KOLOK	-	457,834,728	-	-	401,962,292	-	0.00	87.80	-	-	-
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	-	907,494,156	-	-	598,736,380	-	0.00	65.98	-	-	-
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS KAMPUNG TELENG	-	656,481,152	-	-	405,295,167	-	0.00	61.74	-	-	-
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FKTP PUSKESMAS LUNTO	-	407,014,729	-	-	323,840,350	-	0.00	79.56	-	-	-
MONITORING GARAM BERYODIUM DITINGKAT PASAR DAN DESA/KELURAHAN	9,150,500	9,919,175	7,140,000	8,119,775	7,325,350	6,523,100	88.74	73.85	91.36	-297,876,667	-264,136,067
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	20,295,500	33,780,000	-	20,196,450	33,082,200	-	99.51	97.93	-	-676,516,667	-673,215,000
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	20,295,500	22,000,000	-	20,196,450	21,648,500	-	99.51	98.40	-	-676,516,667	-673,215,000
BIMTEK PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL	-	7,500,000	-	-	7,482,200	-	0.00	99.76	-	-	-
PEMERIKSAAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN/MINUMAN	-	4,280,000	-	-	3,951,500	-	0.00	92.32	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR MANDIRI	260,934,400	375,515,000	-	259,164,925	336,558,150	-	99.32	89.63	-	-8,697,813,333	-8,638,830,833
FASILITASI FORUM KADER KB	190,948,000	339,230,000	-	190,772,550	301,032,650	-	99.91	88.74	-	-6,364,933,333	-6,359,085,000
PELAKSANAAN KEGIATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)	31,211,400	36,285,000	-	30,664,025	35,525,500	-	98.25	97.91	-	-1,040,380,000	-1,022,134,167



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB	38,775,000	-		37,728,350	-		97.30	-	-	-1,292,500,000	-1,257,611,667
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	389,549,980	367,583,000	34,600,000	383,183,569	311,314,900	32,529,200	98.37	84.69	94.02	-12,950,399,333	-12,740,256,433
FASILITASI PERKEMAHAN SAKA BAKTI HUSADA TINGKAT PROPINSI SUMBAR DAN NASIONAL	49,976,600	70,000,000	-	49,601,600	67,708,200		99.25	96.73	-	-1,665,886,667	-1,653,386,667
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA MEDIA PROMOSI SADAR HIDUP SEHAT	91,850,000	50,000,000		90,687,569	41,523,000		98.73	83.05	-	-3,061,666,667	-3,022,918,967
ORIENTASI KRIDA DAN PERKEMAHAN BAKTI SAKA BHAKTI HUSADA (SBH)	59,840,000	50,000,000	-	59,729,575	49,127,500		99.82	98.26	-	-1,975,466,667	-1,990,985,833
PEMANTAPAN PELAKSANAAN TEKNIS PROGRAM DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF	31,400,000	37,000,000		30,252,725	28,983,800		96.35	78.33	-	-1,046,666,667	-1,008,424,167
KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	15,220,000	32,583,000		15,089,125	27,867,400		99.14	85.53	-	-507,333,333	-498,476,833
POSYANDU AWARD	67,288,380	30,000,000		66,744,450	29,734,000	-	99.19	99.11	-	-2,242,946,000	-2,224,815,000
FASILITASI INDIKATOR PHBS PADA KEG. KKG PKK KB-KES TAHUN 2018	30,000,000	57,000,000	10,900,000	27,411,525	26,079,700	8,935,200	91.37	45.75	81.97	-989,100,000	-904,782,300
PENJARINGAN KESEHATAN (SKRINING BAGI MURID BARU SD-SLTA)	15,975,000	15,000,000	19,200,000	15,821,500	14,987,500	19,100,000	99.04	99.92	99.48	-513,300,000	-508,283,333
FASILITASI KEGIATAN HARI KESEHATAN NASIONAL	28,000,000	26,000,000	4,500,000	27,845,500	25,303,800	4,494,000	99.45	97.32	99.87	-928,833,333	-923,689,333
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1,999,900	7,000,000	19,250,000	1,976,650	4,671,750	19,145,000	98.84	66.74	99.45	-47,413,333	-46,743,333
PENATALAKSANAAN IBU HAMIL DAN BALITA KEP	1,999,900	7,000,000		1,976,650	4,671,750		98.84	66.74	-	-66,663,333	-65,888,333
HARI GIZI NASIONAL			19,250,000			19,145,000	0.00		99.45		
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	66,383,400	150,592,000	35,800,000	63,763,025	123,665,177	25,193,410	96.05	82.12	70.37	-2,176,980,000	-2,100,240,757
PENYELENGGARA KEGIATAN STBM		-			-		0.00	-	-	-	-
PENYEHATAN TEMPAT-TEMPAT UMUM		5,960,000			5,923,550		0.00	99.39	-	-	-



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

OPERASIONAL FORUM KOTA SEHAT	66,383,400	94,640,000	35,800,000	63,763,025	79,744,002	25,193,410	96.05	84.26	70.37	-2,176,980,000	-2,100,240,757
PEMERIKSAAN RUMAH DAN SARANA SANITASI		49,992,000			37,997,625		0.00	76.01	-	-	-
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	493,670,660	277,944,500	189,000,000	466,630,500	205,345,300	125,776,210	94.52	73.88	66.55	-16,266,688,667	-15,428,573,790
PENGENDALIAN PENYAKIT TB	54,355,000	69,970,000	71,000,000	53,148,725	58,108,500	54,488,000	97.78	83.05	76.74	-1,740,833,333	-1,717,136,167
PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA	4,050,000	9,550,000	11,000,000	3,420,000	3,897,500	10,392,000	84.44	40.81	94.47	-124,000,000	-103,608,000
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DISEBABKAN VEKTOR	97,682,660	58,500,000	5,525,000	81,708,735	44,368,700	3,000,000	83.65	75.84	54.30	-3,250,563,667	-2,720,624,500
FASILITASI KOMISI PENANGGULANGAN HIV/AIDS (KPA)	14,165,000	34,000,000	23,425,000	12,552,500	17,898,225	1,100,000	88.62	52.64	4.70	-448,741,667	-417,316,667
KEGIATAN PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH		63,174,500	6,800,000		47,756,125	3,970,000	0.00	75.59	58.38	6,800,000	3,970,000
PENINGKATAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH/KLB	323,418,000	32,000,000	47,000,000	315,800,540	25,750,250	29,128,700	97.64	80.47	61.98	-10,733,600,000	-10,497,555,967
SOSIALISASI PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR		10,750,000			7,566,000		0.00	70.38	-	-	-
Pengendalian Faktor resiko dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS			24,250,000			23,697,510	0.00		97.72		
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	141,850,250	133,428,650	-	136,734,925	86,578,450	-	96.39	64.89	-	-4,728,341,667	-4,557,830,833
FASILITASI INTEGRASI BKB DENGAN POSYANDU DAN PAUD (KELOMPOK)	141,850,250	133,428,650	-	136,734,925	86,578,450	-	96.39	64.89	-	-4,728,341,667	-4,557,830,833
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	-	624,080,000	437,275,000	-	402,427,245	256,184,480	0.00	64.48	58.59	437,275,000	256,184,480



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

PELAKSANAAN AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK)		624,080,000	437,275,000		402,427,245	256,184,480	0.00	64.48	58.59	437,275,000	256,184,480
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA (DAK BIDANG KESEHATAN)	1,382,060,000	11,834,286,000	22,632,925,861	1,113,979,323	5,358,422,526	20,406,614,543	80.60	45.28	90.16	-23,435,740,806	-16,726,029,557
PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN/KESEHATAN	200,000,000	200,000,000	199,600,000	194,136,228	191,921,370	196,621,897	97.07	95.96	98.51	-6,467,066,667	-6,274,585,703
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS (ALAT KEDOKTERAN/KESEHATAN)	33,660,000	139,500,000	69,250,000	33,024,450	135,535,150	27,309,600	98.11	97.16	39.44	-1,052,750,000	-1,073,505,400
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KB (DAK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB)	1,148,400,000	1,069,237,000	903,113,000	886,818,645	911,749,800	853,586,730	77.22	85.27	94.52	-37,376,887,000	-28,707,034,770
DAK MURNI PENDAMPING DAN OPERASIONAL		10,425,549,000	21,460,962,861		4,119,216,206	19,329,096,316	0.00	39.51	90.07	21,460,962,861	19,329,096,316
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KB	33,757,000	1,067,108,000	1,139,200,000	32,511,975	813,172,705	1,022,569,350	96.31	76.20	89.76	13,966,667	-61,163,150
PELAYANAN KB	33,757,000	80,000,000	-	32,511,975	32,772,365		96.31	40.97	-	-1,125,233,333	-1,083,732,500
JAMBORE TEMU KREATIFITAS PROGRAM KMBPK		50,000,000			47,314,500		0.00	94.63	-	-	-
OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB		937,108,000			733,085,840		0.00	78.23	-	-	-
Program pelayanan kontrasepsi							0.00		-		
Pelayanan konseling KB			17,700,000			8,092,350	0.00		45.72		
Pelaksanaan Balai Penyuluhan KB dan Alat Kontrasepsi			1,121,500,000			1,014,477,000	0.00		90.46		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AIR	95,238,000	134,047,221	118,756,000	90,079,555	119,686,700	114,945,500	94.58	89.29	96.79	-3,055,844,000	-2,887,706,333
PEMBINAAN PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM		10,230,000			7,525,000		0.00	73.56	-	-	-



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

PEMBINAAN BADAN PENGELOLA SARANA PENINGKATAN AIR MINUM MASYARAKAT (BPSPAMS)	-	9,861,221	-	9,060,800	0.00	91.88	-	-	-		
PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM	54,655,000	31,756,000	14,256,000	51,863,555	21,428,000	13,414,500	94.89	67.48	94.10	-1,807,577,333	-1,715,370,667
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS	40,583,000	82,200,000	104,500,000	38,216,000	81,672,900	101,531,000	94.17	99.36	97.16	-1,248,266,667	-1,172,335,667
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	7,769,831,310	35,000,000	16,396,245,725	6,888,935,197	18,800,000	14,738,355,511	88.66	53.71	89.89	-242,598,131,275	-214,892,817,722
KEMITRAAN PENGOBATAN LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN	30,000,000	35,000,000	35,000,000	26,545,000	18,800,000	30,300,000	88.48	53.71	86.57	-965,000,000	-854,533,333
Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan Kesehatan Sumbar Sakato	2,877,998,475		4,234,406,000	2,204,945,726		4,151,264,150	76.61		98.04		
Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Sawahlunto	4,861,832,835		6,947,174,000	4,657,444,471		6,599,617,000	95.80		95.00		
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Talawi	-		1,724,417,392	-		1,075,994,239	0.00		62.40		
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Silungkang	-		869,477,232	-		777,266,464	0.00		89.39		
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kolok	-		519,061,836	-		468,927,230	0.00		90.34		
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Sungai Durian	-		906,522,101	-		673,710,170	0.00		74.32		
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP PuskesmasKampung Teleng	-		712,310,035	-		555,280,553	0.00		77.95		
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Lunto	-		447,877,129	-		405,995,705	0.00		90.65		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK	109,203,300	247,000,000	36,000,000	109,203,300	167,167,775	9,000,000	100.00	67.68	25.00	-3,604,110,000	-3,631,110,000
PELATIHAN DOKTER KECIL DAN KKR		70,000,000			58,432,275		0.00	83.47	-	-	-



Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2018-2023

REHABILITASI MEDIK BERBASIS MASYARAKAT UNTUK ANAK CEREBRAL PALSY DAN ANAK DENGAN BERKEBUTUHAN KHUSUS	109,203,300	177,000,000	36,000,000	109,203,300	108,735,500	9,000,000	100.00	61.43	25.00	-3,604,110,000	-3,631,110,000
							0.00				
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	17,165,670	20,150,000	-	17,034,250	16,219,375	-	99.23	80.49	-	-572,189,000	-567,808,333
PEMBINAAN KESEHATAN LANJUT USIA	17,165,670	20,150,000	-	17,034,250	16,219,375	-	99.23	80.49	-	-572,189,000	-567,808,333
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	8,196,500	15,000,000	11,800,000	8,081,000	7,456,000	8,737,700	98.59	49.71	74.05	-261,416,667	-260,628,967
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	8,196,500	15,000,000	11,800,000	8,081,000	7,456,000	8,737,700	98.59	49.71	74.05	-261,416,667	-260,628,967
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	1,316,255,175	562,207,500	228,922,000	247,709,135	65,053,850	52,908,614	18.82	11.57	23.11	-43,646,250,500	-8,204,062,553
PENATALAKSANAAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA PADA IBU DAN ANAK	6,817,500	4,000,000	4,890,000	6,790,900	3,981,000	3,415,000	99.61	99.53	69.84	-222,360,000	-222,948,333
REVIEW MATERNAL DAN PERINATAL		8,297,500			6,857,000		0.00	82.64	-	44,250,000	37,446,000
SKRINING HYPOTIROID KONGENITAL	47,764,675	59,000,000	44,250,000	47,094,175	47,333,900	37,446,000	98.60	80.23	84.62	-1,412,373,833	-1,557,758,219
FASILITAS PELATIHAN APN BAGI BIDAN DAN DOKTER	71,646,000	-		70,266,955	-		98.08	-	-	-2,388,200,000	-2,342,231,833
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM KESGA DAN GIZI		6,910,000			6,881,950		0.00	99.59	-	-	-
BANTUAN JAMINAN PERSALINAN JAMPERSAL (DAK NON FISIK)	1,190,027,000	484,000,000	179,782,000	123,557,105	-	12,047,614	10.38	-	6.70	-39,487,784,667	-4,106,522,553
PROGRAM KESEHATAN KERJA	-	10,200,000	-	-	10,132,300	-	0.00	99.34	-	-	-
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN KERJA		10,200,000	-		10,132,300	-	0.00	99.34	-	-	-
PROGRAM KESEHATAN OLAHRAGA	-	4,900,000	-	-	4,318,000	-	0.00	88.12	-	-	-
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN OLAHRAGA		4,900,000	-		4,318,000	-	0.00	88.12	-	-	-



PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	18,040,000	73,800,000	35,382,500	12,665,625	45,866,700	29,051,250	70.21	62.15	82.11	-565,950,833	-393,136,250
KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	18,040,000	47,300,000	25,710,000	12,665,625	40,685,700	22,022,250	70.21	86.02	85.66	-575,623,333	-400,165,250
PELATIHAN BAGI KADER PTM DAN PETUGAS KESEHATAN DALAM RANGKA KESEHATAN JIWA DAN NAPZA		26,500,000	4,170,000		5,181,000	4,029,000	0.00	19.55	96.62	4,170,000	4,029,000
Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	?		5,502,500	?		3,000,000	0.00		54.52		
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN	869,633,810	689,435,978	710,750,000	742,622,656	585,654,033	625,104,842	85.39	84.95	87.95	-28,277,043,667	-24,128,983,691
BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKESMAS TALAWI	192,748,232	164,473,408	131,950,000	156,739,231	149,399,586	118,575,300	81.32	90.84	89.86	-6,292,991,067	-5,106,065,733
BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKESMAS KOLOK	98,681,000	57,596,000	78,800,000	92,942,460	50,469,810	72,830,990	94.18	87.63	92.43	-3,210,566,667	-3,025,251,010
BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	137,989,318	73,873,686	82,000,000	124,280,418	67,916,209	79,076,378	90.07	91.94	96.43	-4,517,643,933	-4,063,604,222
BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKESMAS KAMPUNG TELENG	124,420,340	67,978,306	95,000,000	94,588,751	53,961,972	88,125,853	76.02	79.38	92.76	-4,052,344,667	-3,064,832,514
BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKESMAS LUNTO	112,468,420	73,221,578	87,000,000	103,687,145	64,289,450	70,689,700	92.19	87.80	81.25	-3,661,947,333	-3,385,548,467
BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKESMAS SILUNGKANG (RAWATAN)	203,326,500	152,293,000	150,000,000	170,384,651	138,572,106	113,272,614	83.80	90.99	75.52	-6,627,550,000	-5,566,215,753
BIAYA OPERASIONAL RUTIN INSTALASI FARMASI KOTA		100,000,000	86,000,000		61,044,900	82,534,007		61.04	95.97	86,000,000	82,534,007



Secara umum target di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto termasuk Kategori baik, namun penyerapan dana/realisasi anggaran yang dilaksanakan tidak dapat terserap 100%. Ada beberapa program dengan rasio anggaranyang kurang baik dan mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya :

1. Retribusi Pasien Umum
2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Hal ini disebabkan karena :

1. Kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB tidak bersifat rutinitas saja, namun ada beberapa kegiatan yang inovatif, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi serta kondisi pada tahun yang bersangkutan. Perencanaan anggaran adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang terserap di beberapa kegiatan disesuaikan dengan banyaknya kasus yang ada dilapangan.
2. Adanya sumber anggaran lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan yaitu APBN (BOK, Jampersal dan Akreditasi). Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman kepada juknis yang ditetapkan setiap tahun. Khusus untuk Jampersal juknis pelaksanaannya kurang sesuai dengan kebutuhan Kota Sawahlunto misalnya dana untuk rumah tunggu kelahiran yang kurang dimanfaatkan oleh ibu hamil beresiko tinggi karena akses yang dekat dengan Puskesmas dan rumah sakit.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto dapat diidentifikasi faktor-faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), Ancaman (Treats).

2.4.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength) yang dimiliki Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto antara lain adalah adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan Daerah, meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap kelurahan.

2.4.2 Kelemahan (Weakness)

Kondisi gedung fasilitas kesehatan milik pemerintah yang kurang memadai sesuai standar pelayanan, serta masih belum tercukupinya Sumber Daya Manusia



dan belum terpenuhi kebutuhan SDM sesuai Analisis jabatan. Anggaran pembiayaan Dinas Kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat akan menghambat pembangunan kesehatan sehingga merupakan tantangan untuk peningkatan promosi kesehatan.

2.4.3 Peluang (Opportunities)

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kesehatan adalah adanya fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Kota Sawahlunto, Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah yang melaksanakan BLUD, adanya kader kesehatan di setiap RW, adanya regulasi bidang kesehatan yang mendukung upaya kesehatan, serta adanya dukungan dari lintas sektor untuk peningkatan upaya kesehatan masyarakat.

2.4.4 Ancaman (Treats)

Sedangkan ancaman dalam pelayanan kesehatan antara lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku sehat masih rendah, kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Pemasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Derajat Kesehatan

A. Mortalitas

Mortalitas adalah kejadian kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas yang disajikan pada bab ini yaitu Angka kematian bayi dan jumlah/kasus kematian Ibu. Pada bab ini tidak menjelaskan angka kematian ibu karena angka kelahiran hidup di Kota Sawahlunto tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Gambaran angka kematian bayi di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.1

**Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 s/d 2020**



**Sumber : Laporan Tahunan Dinkessos Tahun 2016
Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2017-2020**

Dari diagram diatas terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 kematian bayi ditemukan sebanyak 20 dari 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi (AKB) 19.31, dan pada tahun 2017 sebanyak 13 dari 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi (AKB) 12,83. Menyadari hal tersebut dilakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan AKB ini yaitu pemantauan ibu hamil resiko tinggi dan bayi baru lahir dengan komplikasi, penyuluhan dan konseling tentang kesehatan ibu dan anak, program P4K dan Sosialisasi/Promosi AKI & AKB, kelas ibu hamil serta program Jampersal. Pada



tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dengan kasus kematian bayi menjadi 22 kasus dan menurun pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 19 kasus dengan penyebab kematian Asfiksia 3, BBLR 3, lain-lain 14 kasus. Program kegiatan yang mempunyai daya ungkit dalam penurunan AKB ini akan terus dilakukan dan dikembangkan sampai AKB ini dapat ditekan serendah-rendahnya.

2. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2018 tidak terjadi kematian ibu di Kota Sawahlunto, hal ini jauh menurun dibandingkan tahun 2016 yang kematiannya sebanyak 3 orang.

Tabel 3.1
Jumlah Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Ibu	3	0	0	3	2
2	Kematian Ibu Nifas	2	0	0	1	1
3	Kematian Ibu Hamil	1	0	0	2	1

*Sumber : Laporan Tahunan Dinkessos Tahun 2016
Laporan Tahunan DinkesdaldudukKB Tahun 2017-2020*

Dari tabel dapat dilihat kematian ibu terjadi pada masa kehamilan dan nifas, 4 kasus kematian ibu terjadi pada masa nifas dan 4 kasus pada masa kehamilan dengan penyebab kematian ibu sebagai berikut ; 2 orang ibu hamil dengan eklamsia, 1 orang ibu hamil dengan infeksi, 2 orang ibu dengan demam, 1 Orang ibu hamil dengan komplikasi sepsis dan diabetes melitus, 1 orang ibu hamil dengan perdarahan, dan 1 orang ibu hamil dengan timoma.

Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, pelaksanaan Review Maternal dan Perinatal (RMP) serta peningkatan sosialisasi tentang kelas ibu hamil dan program P4K.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*age specific death rate/ASDR*)



yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahap sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sangat berpengaruh pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. AKB sangat peka terhadap perubahan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan AHH pada waktu lahir. Angka umur harapan hidup dikeluarkan oleh BPS setiap tahun. Angka umur harapan hidup yang dikeluarkan BPS per Februari adalah angka umur harapan hidup tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah 69.01, dan untuk Kota Sawahlunto Angka Harapan Hidup adalah 69,59.

B. Morbiditas

Definisi Morbiditas adalah keadaan sakit; terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup.

Untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, secara umum selama tiga tahun terakhir di Kota Sawahlunto tidak pernah dilaporkan/ditemukan adanya kasus Polio, Diphteri, Pertusis dan Tetanus Neonatorum. Sementara itu kasus penyakit menular lain seperti TB Paru, ISPA, Diare, Hepatitis B dan Campak angkanya masih berfluktuasi.

Secara rinci kejadian dan perkembangan penyakit menular di Kota Sawahlunto tahun 2018 dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Penyakit Menular

a. Penyakit TB Paru

TBC adalah penyakit yang sangat menular dan mempunyai angka kematian yang sangat tinggi, ditularkan oleh organisme *Mycobacterium Tuberculosis complex*.

TBC bukan merupakan penyakit keturunan, dan bukan disebabkan oleh kutukan atau guna-guna. Kebanyakan TBC menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya, seperti kelenjar getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan bagian tubuh lainnya.

Seseorang dicurigai menderita TBC bila menunjukkan gejala batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kadang-kadang dahaknya bercampur darah, selain itu dapat disertai gejala sebagai berikut:

- 1) Sesak nafas dan nyeri dada
- 2) Berkeringat pada malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan.
- 3) Badan lemah, rasa kurang enak badan, demam meriang lebih dari sebulan.
- 4) Berat badan dan nafsu makan menurun

Cara penularan TBC yaitu :



- 1) Sumber penularan adalah dahak penderita TBC yang didalamnya mengandung kuman TBC
- 2) Jika dalam dahak seseorang ditemukan adanya kuman TBC, berarti orang tersebut pasti menderita penyakit TBC yang sangat menular.
- 3) Bila penderita batuk atau bersin, kuman yang ada di dalam paru-parunya akan menyebar ke udara.
- 4) Penularan terjadi jika seseorang menghirup udara yang mengandung kuman TBC.

Untuk mengetahui seseorang TBC adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dahak tersangka TB dengan mikroskop.
- 2) Seseorang dipastikan menderita TBC jika dahaknya mengandung kuman TBC.
- 3) Bila dalam dahaknya tidak ditemukan kuman TBC, namun gejalanya mengarah ke TBC maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan sinar Rontgen.
- 4) Bila pemeriksaan sinar Rontgen hasilnya positif, maka orang itu dinyatakan sebagai penderita TBC Rontgen Positif.

Cara pemeriksaan dahak :

- 1) Untuk memastikan seseorang menderita TBC atau tidak, maka perlu dilakukan pemeriksaan dahak 2 kali (SP, Sewaktu dan Pagi)
- 2) Sewaktu (S) : dahak diambil di unit pelayanan kesehatan pada waktu kunjungan pertama kali.
- 3) Pagi (P) : dahak diambil pada pagi hari berikutnya dirumah, segera setelah bangun tidur pagi, kemudian dibawa dan diperiksa di unit pelayanan.

Penderita dinyatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan ulang dahak pada satu bulan sebelum akhir pengobatan dan pada akhir pengobatan tidak diketemukan adanya kuman dan yang dapat menyatakan kesembuhan penderita TBC adalah petugas kesehatan.

Perkiraan penemuan semua kasus TBC dalam tahun 2020 sebanyak 381 kasus dengan perkiraan suspek 3810 ternyata kasus TB semua kasus yang ditemukan sebanyak 47 kasus dengan CDR 14,8 % (target 65%), sedangkan untuk Angka Notifikasi Kasus (*Case Notification Rate=CNR*) pada tahun 2020 sebesar 74,57 per 100.000 penduduk.

Jika dievaluasi di tingkat puskesmas maka dapat dilihat bahwa ada puskesmas yang mengalami peningkatan dan penurunan dalam penemuan kasus TB. Untuk puskesmas yang CNR nya meningkat minimal 5 % dari tahun sebelumnya yaitu Puskesmas Silungkang dan Puskesmas Lunto. Sedangkan 4 Puskesmas lainnya mengalami penurunan trend, hal ini dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :



Tabel 3.2
ANGKA NOTIFIKASI KASUS TB / CNR DI PUSKESMAS SE KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019 DAN 2020

No	Puskesmas	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus TB Semua Type	CNR	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus TB Semua Type	CNR
1	Talawi	19.443	10	51,4	19.600	11	56,1
2.	Kolok	7.222	14	193,8	7.281	4	54,9
3.	Sei. Durian	11.372	8	70,3	11.464	4	34,9
4.	K. Teleng	8.393	3	35,7	8.460	7	82,7
5.	Lunto	4.959	3	60,5	4.999	2	40
6.	Silungkang	11.135	13	116,7	11.223	7	62,37
7.	RSUD		50			12	
	KOTA	62.254	101	161,5	63.207	47	74,57

Sumber : Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2020

b. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) ditularkan oleh *nyamuk Aedes Aegyti* yang tempat perindukannya pada air tergenang yang tidak kontak langsung dengan tanah, didalam bak mandi, ban bekas, tempayan, dispenser, pot-pot bunga yang berisi air, baju yang bergelantungan dan lain-lain serta mempunyai kebiasaan menggigit pada pagi dan sore hari. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit endemis di Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto juga sudah termasuk daerah endemis DBD karena selama tiga tahun berturut-turut terdapat kasus DBD namun tidak terjadi KLB dan kematian karena DBD.

Untuk menentukan suatu daerah tersebut endemis DBD atau tidak, ada stratifikasinya yaitu :

- Daerah Endemis adalah Daerah yang dalam 3 tahun terakhir setiap tahun ada penderita DBD
- Daerah Sporadis adalah daerah yang dalam 3 tahun terakhir terdapat penderita DBD tetapi tidak setiap tahun.
- Daerah Potensial adalah Daerah yang dalam 3 tahun terakhir tidak pernah ada penderita DBD, tetapi penduduknya padat, mempunyai hubungan transportasi yang ramai dengan wilayah yang lain dan presentase rumah yang ditemukan jentik lebih atau sama dengan 5%.



- Daerah Bebas yaitu Daerah yang tidak pernah ada penderita DBD selama 3 tahun terakhir dan presentase rumah yang ditemukan jentik kurang dan 5%. Distribusi gejala DBD yaitu hampir semua kasus menunjukkan gejala demam mendadak yang diikuti rash kemerahan, adanya sebagian kasus yang menunjukkan tanda-tanda perdarahan, trombositopenia <100.000 iu dan hematokrit yang meningkat tajam lebih dari 20%.

Tabel 3.4
Distribusi Kasus DBD Per Puskesmas Se Kota Sawahlunto
Periode Tahun 2016 s/d 2020

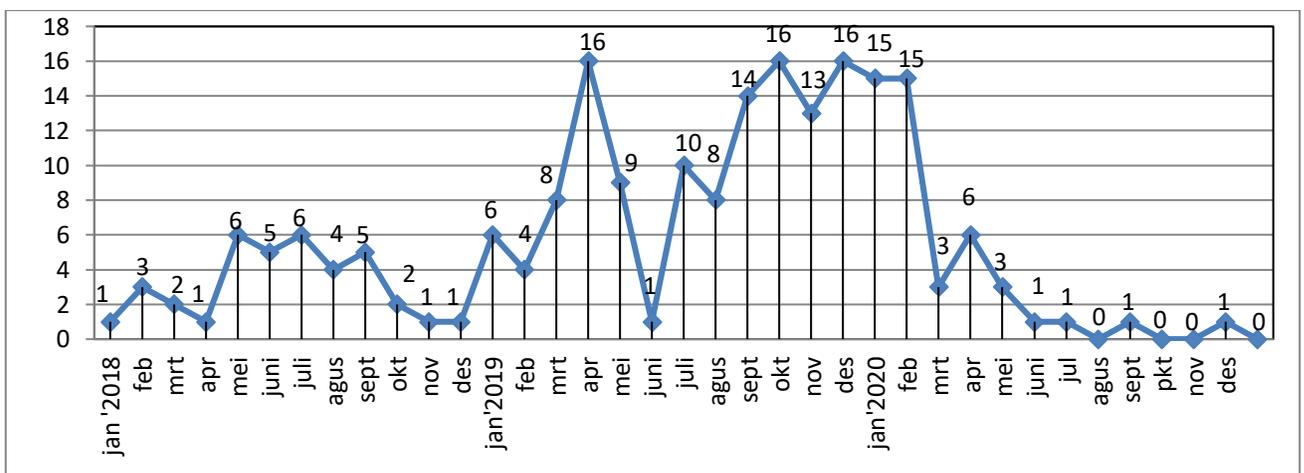
NO	PUSKESMAS	KASUS DBD/THN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Talawi	108	63	4	20	16
2	Kolok	13	16	6	6	0
3	Sungai Durian	21	46	13	29	13
4	Kampung Teleng	20	13	1	17	3
5	Lunto	9	7	2	4	4
6	Silungkang	34	35	11	45	10
	Kota	205	180	37	121	46

Sumber : Laporan Tahunan Dinkessos Tahun 2016
Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2017-2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa kasus DBD Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak karena terkait dengan perilaku masyarakat. Bila vector penyakit ini dapat dihilangkan, otomatis penyebaran kasus ini dapat ditekan.

Dari grafik berikut dapat dilihat trend pola maksimum, minimum dan standar deviasi dari kasus-kasus DBD yang ada di Kota Sawahlunto selama periode tahun 2016 s/d 2020 per Kecamatan se Kota Sawahlunto.

Grafik 3.2
Pola Musiman DBD Menurut Bulan Di Kota Sawahlunto
Tahun 2018 s/d 2020



Sumber : Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2018-2020



Dari grafik diatas dapat dilihat adanya penurunan kasus DBD, selama 3 tahun dari tahun 2018 dan 2020 pada grafik tersebut terlihat kecendrungan peningkatan kasus DBD pada tahun 2020 terjadi pada bulan februari.

c. HIV/AIDS

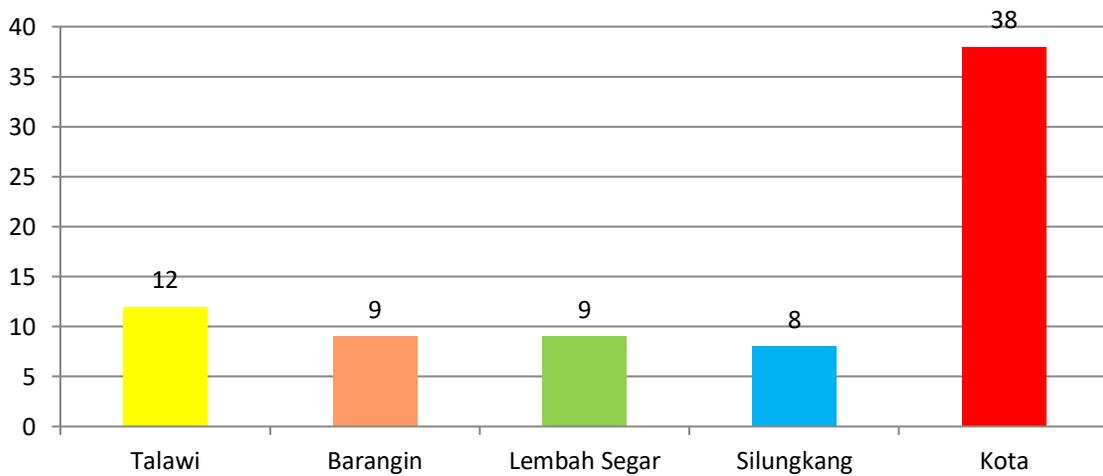
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang didapat, AIDS disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang hidup didalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, sperma, vagina dan air susu ibu.

Penderita HIV positif adalah seseorang yang telah terinfeksi virus HIV yang dapat menularkan penyakitnya walaupun nampak sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Sedangkan penderita AIDS adalah seseorang yang menunjukkan tanda-tanda dari sekumpulan gejala penyakit yang memerlukan pengobatan setelah sekian waktu terinfeksi HIV.

Penyakit HIV/AIDS ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena secara epidemiologi dari 1 kasus HIV terdapat 100 orang dibelakangnya yang berisiko tertular. Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan berbagai sektor terkait termasuk masyarakat sendiri dalam hal perubahan perilaku. Untuk pengendalian penyakit menular peranan dari lintas sektor dan program terkait sangat penting agar hasil lebih optimal. Untuk Kota Sawahlunto dari tahun 2002 s/d Tahun 2020 jumlah kasus HIV/AIDS adalah 38 kasus dengan kematian sebanyak 22 orang, seperti pada tabel berikut :

Grafik 3.3

**Kasus HIV AIDS Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto
Dari Tahun 2002 s/d 2020**



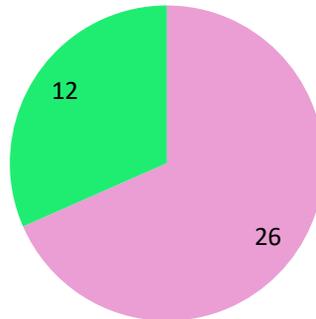
**Sumber : Laporan Tahunan Dinkessos Tahun 2013-2015
Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020**

Dari 38 kasus AIDS di Kota Sawahlunto 26 kasusnya adalah laki-laki dan 12 kasus adalah wanita sebagaimana yg tergambar pada diagram berikut :



Grafik 3.4

Kasus HIV AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2002 s/d 2020

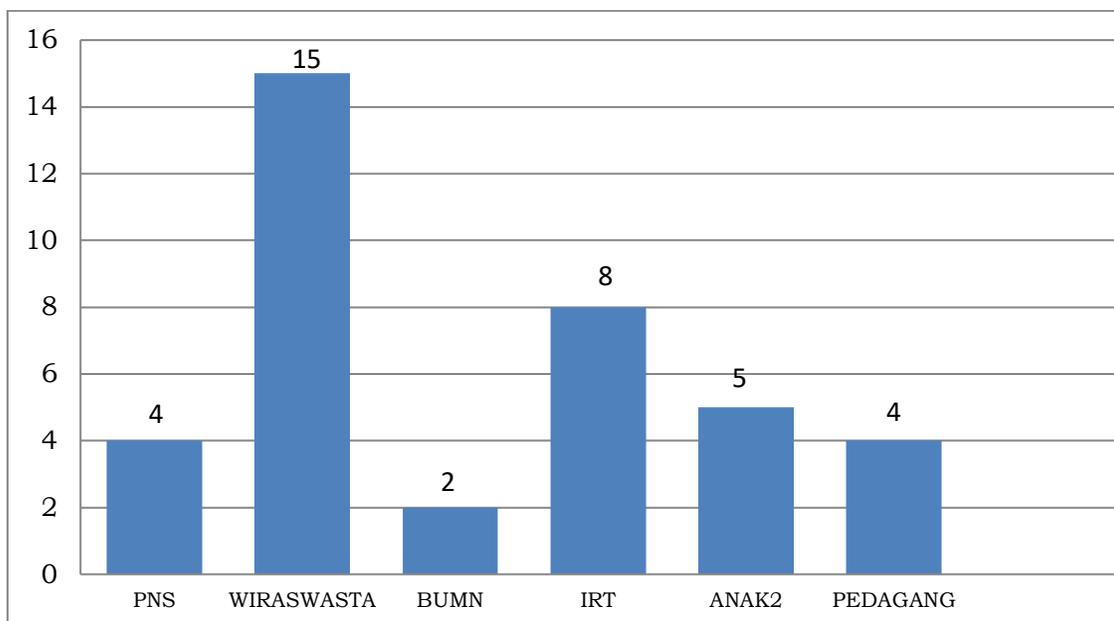


**Sumber : Laporan Tahunan Dinkessos Tahun 2013-2015
Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020**

Jika dilihat dari jenis pekerjaan kasus AIDS berasal dari berbagai profesi dan yang terbanyak ada pada wiraswasta dan 5 orang juga penderitanya anak-anak yang tertular dari orang tua mereka pasca melahirkan hal ini disebabkan karena kurang tahunya penderita dengan faktor resiko yang di lalunya.

Grafik 3.5

Kasus HIV AIDS Berdasarkan Jenis Pekerjaan tahun 2002 s/d 2020 Di Kota Sawahlunto



**Sumber : Laporan Tahunan Dinkessos Tahun 2013-2015
Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020**

Untuk itu kita akan terus melakukan penjangkaran secara dini agar para masyarakat yang mempunyai faktor resiko di dirinya agar segera untuk melakukan pemeriksaan diri dan cek status HIV secara gratis dan hasilnya dirahasiakan di pelayanan kesehatan se Kota Sawahlunto.

Pengendalian yang dilaksanakan yaitu :

- a) Telah terbentuknya komisi penanggulangan kasus HIV/AIDS (KPA) Kota Sawahlunto.



- b) Mensosialisasikan HIV/AIDS kepada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi.
- c) Menyarankan agar kelompok resiko tinggi tersebut dapat melakukan pemeriksaan darah sedini mungkin dan konseling kepada konselor secara sukarela / Voluntary Counseling and Testing (VCT)
- d) Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kontak serumah dengan penderita.
- e) Tatalaksana pemandian mayat positif HIV/AIDS dilaksanakan sesuai protap oleh petugas pemulasaran jenazah/pemandi mayat, keluarga yang didampingi oleh petugas kesehatan kota.
- f) Petugas kesehatan melakukan pengawasan minum obat kepada penderita yang masih hidup.

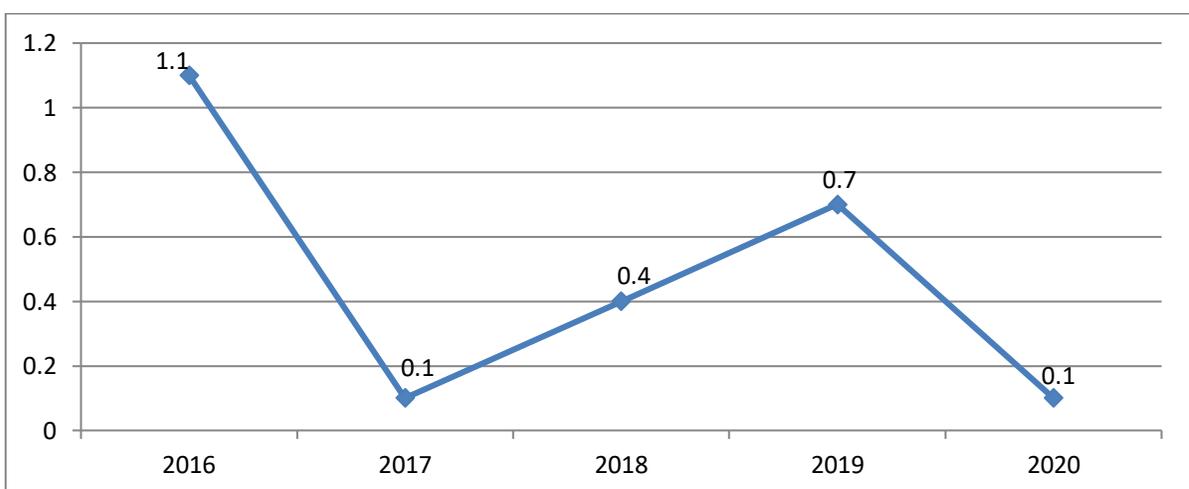
Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah minum obat dan konseling yang terputus dan kepercayaan penderita dengan berobat ke dukun, pekerjaan seperti penjaja seks komersial yang tidak dapat diberhentikan secara langsung saja oleh penderita dengan alasan faktor ekonomi dan lain-lain.

d. Status Gizi

1. Persentase Balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk

Pelacakan kasus Balita gizi buruk bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya masalah. Pelacakan dilakukan oleh Petugas Gizi Puskesmas dan pembina wilayah dengan cara pengukuran ulang antropometri untuk mengetahui status gizi Balita sebenarnya kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada ibu balita untuk mendapatkan data umum (pendidikan, pekerjaan dan umur orang tua) serta data khusus (pemberian ASI, imunisasi, riwayat penyakit, berat badan lahir dll). Setelah didapatkan data, selanjutnya dilakukan penatalaksanaan sesuai kasus

Grafik 3.6
Prevalensi Gizi Buruk di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 s/d 2020



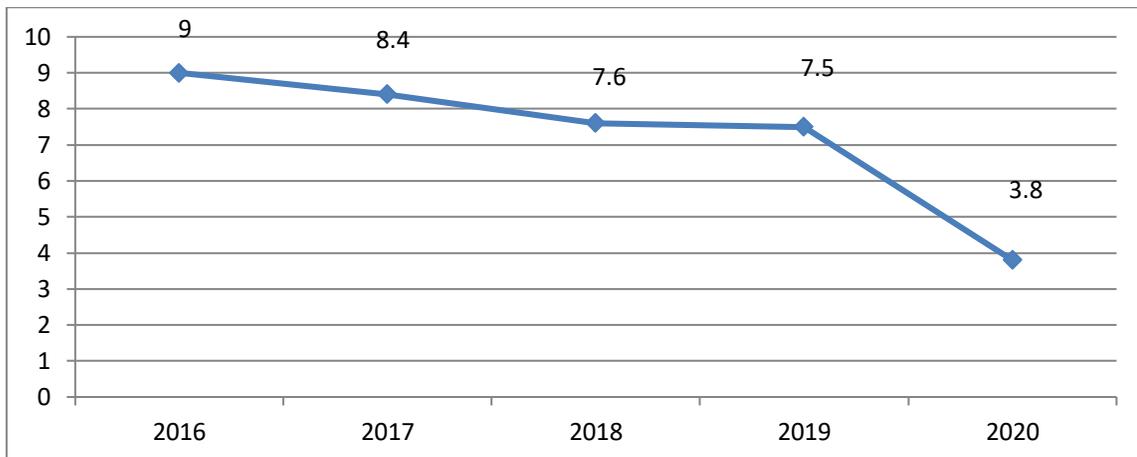
Sumber: Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020

Dari grafik di atas dapat dilihat terjadi peningkatan kasus Balita Gizi buruk tahun 2016 (1,1%), namun demikian dengan telah dilakukannya upaya-upaya perbaikan gizi melalui sosialisasi tentang makanan bergizi dan seimbang kepada masyarakat maka angka status gizi buruk dapat turun pada tahun 2017 (0,1%). Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 terjadi lagi peningkatan status gizi buruk



tahun 2018 menjadi 0,4% dan tahun 2019 menjadi 0.7%, hal ini disebabkan karena pada balita yang mengalami gizi buruk juga memiliki riwayat penyakit Penyerta seperti Cerebral Palcy serta gangguan tumbuh kembang sehingga menyebabkan balita susah untuk naik berat badannya yang berakibat kepada gizi buruk yang berkepanjangan. Dan tahun 2020 terjadi penurunan status gizi buruk menjadi 0.1%, hal itu tidak terlepas dari komitmen dan upaya-upaya perbaikan gizi yang dilakukan secara adekuat.

Grafik 3.7
Prevalensi Gizi Kurang Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas dapat diketahui tren penurunan prevalensi Balita Gizi kurang di Kota Sawahlunto dari Tahun 2016 (9%) sampai tahun 2020 (3.8%). Hal ini bisa terjadi karena telah dilakukan upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat melalui sosialisasi tentang gizi seimbang kepada Ibu Balita. Selain itu bantuan Makanan Pendaping ASI (MP-ASI) dari Kementrian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kota Sawahlunto yang secara rutin diberikan kepada Balita Gizi Kurang oleh Tenaga Pengelola Gizi Puskesmas berdampak terhadap penurunan angka Gizi Kurang di Kota Sawahlunto hingga saat ini.

2. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) Balita

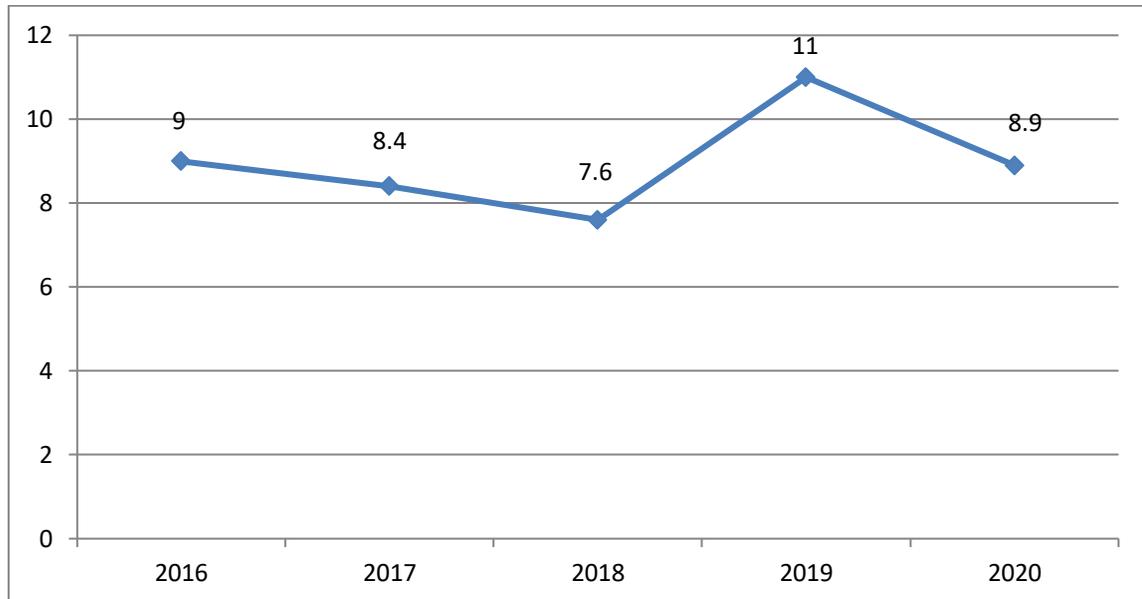
Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan seusianya. Stunting merupakan kondisi pendek dan sangat pendek. Di kota Sawahlunto Angka Stunting adanya kecendrungan menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, hal ini dapat dilihat bahwa masih adanya ibu hamil mengalami anemia dan KEK pada awal kehamilan.
2. Masih adanya balita yang mengalami wasting (Kurus).
3. Masih adanya balita yang sangat kurus dan disertai penyakit penyerta

Prevalensi stunting diKota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3.8
Prevalensi Stunting Pada Balita
Di Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018



Sumber : Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020

Penatalaksanaan yang telah dilakukan anatara lain :

1. Memberikan pelayanan kepada ibu hamil sesuai standar (10T) yang salah pelayanannya penjarangan ibu hamil anemi dan ibu hamil KEK.
2. Memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami KEK.
3. Memberikan makanan tambahan kepada balita yang mengalami wasting (Kurus) dan balita yang sangat kurus.
4. Penyuluhan tentang pentingnya pemberian Asi Eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan.
5. Adanya Pos Gizi di puskesmas yaitu Puskesmas Talawi.

e. Persentase N/D'

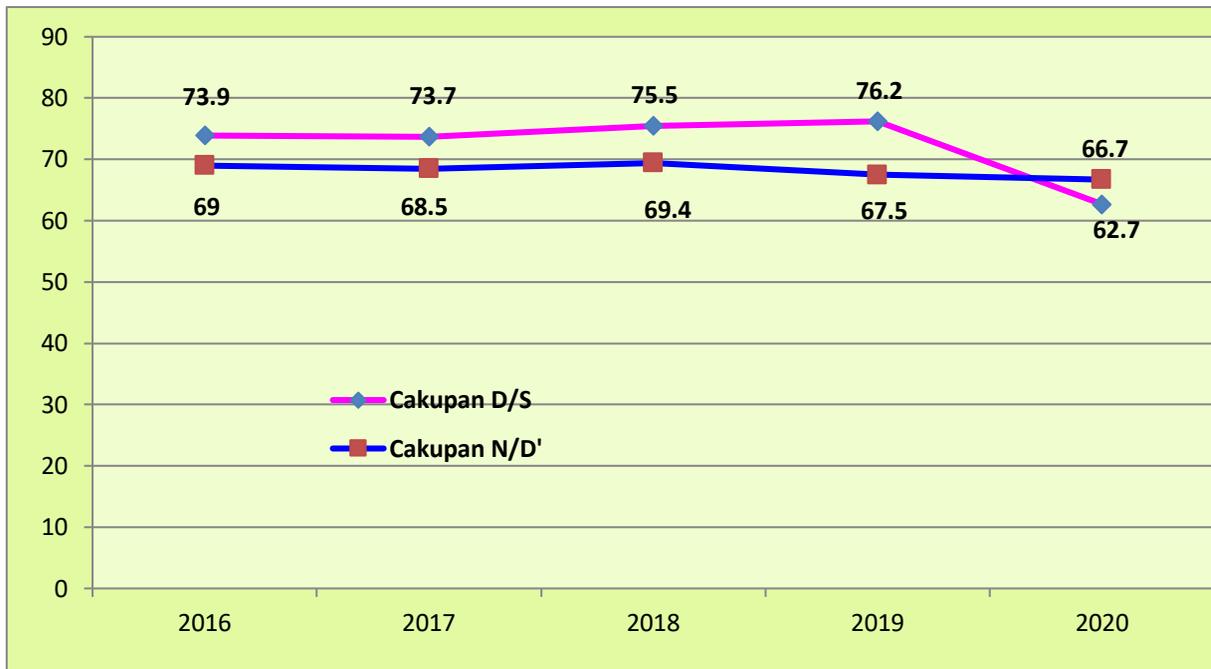
D/S merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau pertumbuhan Balitanya. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Balita ditimbang dengan jumlah seluruh Balita yang ada. Sedangkan N/D' menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program yaitu membandingkan Balita yang naik berat badannya pada dua kali penimbangan berturut turut dengan jumlah Balita yang ada di wilayah kerja.

Pada Tahun 2019 cakupan D/S Balita di Kota Sawahlunto sebesar 76.2% lebih tinggi dibandingkan dengan cakupan Tahun 2020 yakni sebesar 62.7 %. Begitu juga cakupan N/D' pada Tahun 2019 lebih tinggi, yakni 67.5% dari 66.7% cakupan pada tahun 2020. Pemantauan berat badan Balita secara rutin akan juga menjadi motivasi bagi ibu sasaran untuk memberikan makanan terbaik bagi Balitanya yaitu makanan yang beragam, bergizi dan berimbang (sesuai dengan umur Balita) dengan harapan berat badan Balitanya akan selalu meningkat sesuai garis tumbuh. Ini berdampak terhadap peningkatan N/D' Balita. Hanya saja penurunan terjadi karna disebabkan pandemi covid 19 yang menurunkan angka kunjungan ibu balita ke posyandu.



Pada grafik di bawah ini dapat dilihat cakupan D/S dan N/D' selama 5 tahun terakhir.

Grafik 3.9
Cakupan D/S dan N/D' Balita Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber : Laporan Tahunan DinkesdaldukKB Tahun 2016-2020

Beberapa tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatkan cakupan D/S dan N/D' adalah :

- Mengaktifkan pokja Posyandu yang ada di desa/kecamatan dengan salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah advokasi ke kecamatan untuk menyamakan persepsi tentang peran masing-masing lintas sektor terkait baik dalam perannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat maupun untuk peningkatan gizi.
- Merealisasikan kebijakan yang telah ada untuk mengupayakan petugas Puskesmas yang hadir ke Posyandu minimal 3 orang sehingga kualitas pelaksanaan kegiatan termasuk konseling dapat lebih ditingkatkan.
- Memberikan motivasi pada keluarga balita tentang pentingnya gizi seimbang balita melalui kegiatan sosialisasi
- Memberikan surat motivasi yang ditandatangani oleh Walikota untuk ibu hamil, ibu bersalin dan balita yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut dengan tujuan memberikan informasi kesehatan yang perlu diketahui dan diaplikasikan oleh ibu selama kehamilan, selama menyusui termasuk ASI eksklusif dan memotivasi ibu agar dapat menyediakan makanan dengan gizi seimbang
- Melaksanakan pelatihan MP-ASI untuk petugas kesehatan

Kesehatan masyarakat yang berkualitas akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan di Kota Sawahlunto dilakukan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif dan preventif untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat mengingat beberapa penyakit yang



berjangkit luas dimasyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan rendahnya pola hidup sehat.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Sawahlunto masih relatif masih kurang. Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai Pembina kesehatan wilayah yaitu melalui 4 jenis upaya yaitu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan perorangan, dan memantau serta mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk penguatan fungsi tersebut maka dilakukan upaya peningkatan sumberdaya manusia di puskesmas disamping pemenuhan tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dan tenaga paramedis seperti perawat dan bidan. Selain itu diutamakan juga ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan lainnya yaitu tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan tenaga analis kesehatan.

Pemenuhan standar tenaga kesehatan di puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas, mutu pelayanan kesehatan dan kemampuan teknis untuk melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang masih kurang dan belum merata dapat mempengaruhi pencapaian IPM di Kota Sawahlunto.



Tabel 3.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mortalitas	Angka Kematian Bayi	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Faktor pemenuhan nutrisi ibu hamil dan genetik karna sebagian besar penyebab kematian ibu adalah kelainan kongenital- Kurangnya Pengetahuan Ibu tentang pendidikan kesehatan terutama sebelum dan selama kehamilan- Kurangnya motivasi ibu dalam membaca Buku KIA yang berisi informasi kesehatan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir bahkan sampai Balita
		Angka Kematian Ibu	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya pengetahuan Ibu hamil, bersalin dan nifas dalam mengenali tanda-tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera- Kurangnya motivasi ibu hamil dengan komplikasi dan penyakit penyerta dalam memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan rujukan- Adanya faktor Sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keluarga dalam melakukan rujukan ibu hamil, bersalin dan nifas ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
2	Morbilitas	bayi yang ditimbang di Posyandu	<ul style="list-style-type: none">- Rasa khawatir ibu balita membawa anaknya keposyandu karna masa pandemi- Kurangnya motivasi ibu balita membawa anaknya ke posyandu yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga
		Stunting	<ul style="list-style-type: none">- rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi- Adanya Balita dengan Status Gizi buruk dengan penyakit penyerta



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kota Sawahlunto yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Sawahlunto periode Tahun 2018-2023 menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode waktu yang sama dan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang didalamnya memuat program-program pembangunan kesehatan yang terdapat permasalahan sesuai dengan tabel 3.1. Berikut tabel telaahan visi, misi dan program Walikota, Wakil Walikota Sawahlunto.

Tabel 3.6

Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota, Wakil Walikota Sawahlunto

No	Visi/Misi/Program Kerja Walikota/Wakil Walikota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Dengan Kebersamaan kita wujudkan sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera					
Misi 5 :Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat					
1		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Adanya Balita dengan Status Gizi buruk dengan penyakit penyerta	Adanya dukungan dari berbagai lintas sektor dan lintas program dalam menurunkan prevalensi stunting
				Kurangnya motivasi keluarga dalam pemberian PMT yang diberikan oleh puskesmas	Adanya pendanaan yang mencukupi dalam penurunan prevalensi stunting
			Angka Kematian Ibu	Ekonomi dan Sosial masyarakat serta masih adanya persalinan di non fasilitas pelayanan kesehatan	Adanya Koordinasi dengan Lintas Sektor dan lintas program
				Kurangnya pemahaman ibu tentang kesehatan selama hamil, bersalin dan nifas	
Angka Kematian Bayi	Ekonomi masyarakat serta masih kurangnya pemahaman ibu tentang informasi kesehatan bayinya	Adanya Koordinasi dengan Lintas Sektor dan lintas program			
	Kurangnya motivasi ibu dalam membaca Buku KIA yang berisi tentang informasi kesehatan bayinya				



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai instansi teknis bidang kesehatan di Kota Sawahlunto, Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program- program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun melalui peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015 – 2019 dan memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Sustainable development Goals (SDG's).

Penyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto diharapkan dapat berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.7

Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat

No	Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Misi 1 Provinsi Sumatera Barat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat , berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Pola hidup yang tidak sehat yang mempengaruhi derajat kesehatan	Perlu peningkatan layanan kesehatan bagi semua penduduk
					Adanya pemeriksaan atau skrining kesehatan melalui posbindu - PTM
		Menurunnya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Adanya penyakit penyerta serta pola pemenuhan nutrisi yang tidak sesuai pada balita	Adanya dukungan dari lintas program dan lintas sektor



3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Guna meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Kesehatan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan perencanaan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun Isu-Isu Strategis antara lain:

1. Peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi
2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Pencegahan Stunting
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS)
5. Penguatan sistem kesehatan daerah
6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan“, maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Secara umum tujuan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. “ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan “. Untuk mencapai tujuan tersebut secara makro dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator kesejahteraan sosial.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Penentuan tujuan dan sasaran Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD perubahan Kota Sawahlunto, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai tahun 2023 adalah

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Menurunkan Prevalensi Stunting



4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto dalam 5 (lima) tahap 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga berencana.



Tabel 4.1
 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
 Tahun 2018-2020 (sebelum perubahan)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN TAHUN								
				2018			2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	69.49	69.59	100.14	69.83	69.87	100.06	70.47	70.00	99.33
		Tersedianya Jaminan Hidup Sehat Bagi Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	27	24	88.89	29	24.6	84.83	31	24	77.42
			Jumlah Kematian Ibu	1	0		0	3		0	2	
			Angka Kematian Balita	2.51	23.7		2.35	27.1		2.17	21.6	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	28	18,6	2,9	28	7.7	173	26.8	5.3	179
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)	90	90	100	90	90,2	101	94	94	100	



			Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	78	85	108,9	78	92,2	1018,3	81	91	112
		Meningkatnya keamanan obat dan pangan dimasyarakat.	Persentase sarana produksi makanan yang sesuai standar	90	90	100	90	90,95	97,7	91	88	92,2
			Persentase sarana distribusi obat dan makanan sesuai standar	90	70	77,78	91	90,2	99,12	91	88,5	95,6
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam berperilaku hidup bersih sehat	Indeks Keluarga Sehat	0.46	-	-	0.48	-	-	0.5	-	-
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	95	95	100	95	97.1	102.21	96	96.07	100.07
			Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	94.46	81.5	86.28	94.66	81.5	86.10	94.86	80.60	84.97
			Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	≤ 2,51	2.40	95.62	≤ 2,40	2.38	99.17	≤ 2,35	3.37	143.40
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	94	82,4	87,6	94	84,23	89,60	95	92.6



		Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar	73	70	91,5	73	71,63	98,2	75	74	98.7
		Terlaksananya operasional prosedur pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas	94	79,3	84,6	94,66	81,36	85,9	82.8	80.6	97.3
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	Persentase Penduduk Yang memiliki jaminan Kesehatan	95	96,8	99,49	95	97,1	101%	96	96.07	100.1
3.	Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas Kependudukan	Angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	2,1	2,3	90,48	2,38	2,23	106%	2.33	2.027	113
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang menggunakan alat kontrasepsi	65.8	78.65		65.82	77.05		66.88	73.04	
			Persentase Unmeet need (Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi)	23.51			19.31			17.53		



Dari 20 indikator Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kb Kota Sawahlunto, yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018 -2023, ada beberapa indikator yang belum mencapai target 100% selama tiga tahun terakhir antara lain:

1. Persentase Keluarga Sehat

Indikator kesehatan keluarga adalah indikator utama yang digunakan sebagai penanda status kesehatan suatu keluarga. Adanya indikator ini adalah bagian dari pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Tujuan Indikator keluarga sehat adalah untuk membangun kesehatan masyarakat tentang menjaga kesehatan. Jadi , bukan hanya tentang berobat ketika sakit saja, tapi sehat juga dimulai dari kebiasaan sehari-hari untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit. Keluarga dikatakan sehat jika memenuhi 12 indikator diantaranya

- a. Keluarga mengikuti program keluarga berencana
- b. Ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- d. Bayi mendapatkan Asi eksklusif
- e. Balita mendapatkan pemantauan dan pertumbuhan
- f. Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- j. Keluarga sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
1. Keluarga mempunyai akses dan menggunakan jamban sehat

Jika semua indikator terpenuhi maka akan meningkatkan persentase keluarga sehat yang ada di Kota Sawahlunto, sehingga dalam mencapainya diperlukan kerjasama lintas sektor dan kesadaran masyarakat.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu adalah kematian selama kehamilan sampai periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya dan bukan disebabkan karna kecelakaan, kematian ibu secara nasional mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan dikota sawahlunto juga mengalami penurunan secara angka, akan tetapi dari segi statistik per 100.000 kelahiran hidup terdapat 2 kematian ibu tahun 2020, sementara kelahiran hidup di Kota Sawahlunto tidak mencapai 1000 KH, sehingga diharapkan untuk kedepannya Kota Sawahlunto bisa mencapai zero kematian ibu. Penyebab kematian ibu tidak terlepas dari 3 T (terlambat) dan 4 T (terlalu) dan komplikasi yang dialami ibu selama masa kehamilan, bersalin dan nifas.. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian



Penduduk saja tetapi perlu dukungan dari lintas sektor terkait dalam menekan angka kematian ibu .

3. Angka Kematian Balita (AKBA)

Kematian anak yang berusia di bawah lima tahun, secara nasional angka kematian Balita menurun dari tahun ke tahun, sama halnya dengan kematian balita dikota sawahlunto, penyebab kematian balita adalah penyakit genetik, pneumonia,dll, sehingga untuk menurunkan angka kematian balita perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam menekan angka kematian tersebut.

4. Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya yang produktif, sehingga ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis disuatu daerah menjadi pertimbangan mengenai kecukupannya, selain itu perlu di perhatikan juga mengenai tanda registrasi dan kualitas dari tenaga kesehatan atau tenaga medis yang direkrut, dan perlu dilaksanakannya pelatihan bagi tenaga yang sudah lama bekerja sehingga mengetahui perkembangan ilmu terbaru dibidang kesehatan.



Tabel 4.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto
Tahun 2021-2023 (setelah perubahan)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	70.14	70.28	70.42	70.42
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Bayi	19	18	18	18
			Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan	0	0	0	0
			Persentase Balita Gizi Buruk	7,8	7,5	7,3	7,3
			Jumlah Kasus Kematian Balita	0	0	0	0
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100



		Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terkredeitasi	Utama	Utama	Utama	Utama
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil	100	100	100	100
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	77	78	79	79
		Persentase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skring Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100
		Persentase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar	70	71	72	73
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100



			Persentase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100
			Persentase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100	100	100	100
			Persentase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar	100	100	100	100
			Persentase orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar	100	100	100	100
	Menurunkan prevalensi stunting		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	6,1	3,78	2,65	2,65
		Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun	2.29	2.25	2.22	2.22
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/mCPR)	67.78	68.55	69.21	69.21
			Persentase Unmeet need (Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi)	15.97	14.6	13.4	13.4



Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah RPJMD 2018-2018 sebelum dan setelah mengalami perubahan.

Tabel 4.3
Perubahan Tujuan dan Sasaran
Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan sebelum perubahan	Tujuan setelah perubahan	Sasaran sebelum perubahan	Sasaran setelah perubahan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia di Kota Sawahlunto	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Menurunkan Prevalensi Stunting		Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana



Tabel 4.4
Perubahan Indikator
Sebelum dan Setelah Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Setelah Perubahan
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)
Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Kasus Kematian Bayi
Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan
Angka Kematian Balita	Persentase Balita Gizi Buruk
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	Jumlah Kasus Kematian Balita
Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar
Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Persentase sarana produksi makanan yang sesuai standar	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk
Persentase sarana distribusi obat dan makanan sesuai standar	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi
Indeks Keluarga Sehat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil
% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan
Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar
Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	Persentase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Persentase sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar
Persentase Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas	Persentase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar
Persentase Penduduk Yang memiliki jaminan Kesehatan	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun	Persentase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Persentase PUS yang menggunakan alat kontrasepsi	Persentase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar



Persentase Unmeet need (Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi)	Persentase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar
	Persentase orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/mCPR)
	Persentase Unmeet need (Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi)

Terjadinya perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 ini dipengaruhi oleh adanya pergantian Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016 – 2021 ke periode 2021- 2026, sebagaimana Renstra Kabupaten/ Kota mengacu kepada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara otomatis Renstra Kota sawahlunto mengalami perubahan.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sebelum perubahan

VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera.			
MISI : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Tersedianya Jaminan Hidup Sehat Bagi Masyarakat	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan penyakit menular, penyakit tidak menular serta kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan keluarga, gizi masyarakat dan pola asuh anak yang baik.
			2. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat.
			3. Pemerdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
			4. Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu, posbindu dan pelayanan integrasi lainnya dalam pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular
			5. Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi.



Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perilaku masyarakat tentang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
		2. Pemerdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
		3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi terkait pengelolaan lingkungan yang berkualitas
Meningkatnya keamanan obat dan pangan dimasyarakat.	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.	4. Meningkatkan teknologi tepat guna yang mudah diimplementasikan dimasyarakat.
		1. Meningkatkan pengawasan layak edar produk olahaan makanan dan minuman.
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam berperilaku hidup bersih sehat	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	2. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat
		1. Peningkatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan masyarakat.
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kebudayaan gerakan masyarakat hidup sehat dan PHBS.
		3. Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
		4. Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi.



Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	Kualitas Manusia	Peningkatan ketersediaan penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan. 2. Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi
	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar		Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan 2. Meningkatkan pelayanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekes rumah tangga (PKRT)
	Terlaksananya operasional prosedur pelayanan kesehatan sesuai standar		Peningkatan ketersediaan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. 2. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan berbagai standar pelayanan kesehatan yang diikuti dengan pengembangan system monitoring dan evaluasi
	Tersedianya Kesehatan Bagi Masyarakat	Jaminan Seluruh	Peningkatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan masyarakat 100% dan kerjasama para pihak.
Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Meningkatnya Kependudukan	Kualitas	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk bagi masyarakat 2. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR).



			3. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL),
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berencana Keluarga	Peningkatan Akses, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang merata dan berkualitas.	1. Peningkatan koordinasi dan supervisi penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB. 2. Peningkatan pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri



Dari tabel 5.1 dan 5.2 terdapat perbedaan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebelum dan setelah perubahan RPJMD tahun 2018 – 2023, berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat hal-hal yang mengalami perubahan antara lain

1. Tujuan sebelum dan setelah perubahan RPJMD tahun 2018-2023

Sebelum perubahan terdapat 3 tujuan diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Sementara itu setelah perubahan menjadi 2 tujuan diantaranya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting.

2. Sasaran sebelum dan setelah perubahan RPJMD tahun 2018-2023

Sebelum perubahan terdapat 10 sasaran dan setelah perubahan terdapat 3 sasaran yang merupakan tujuan sebelum perubahan pada RPJMD tahun 2018 - 2023, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dan meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga berencana.

3. Strategi sebelum dan setelah perubahan RPJMD tahun 2018-2023

Sebelum perubahan terdapat 10 strategi dan setelah perubahan terdapat 4 strategi RPJMD tahun 2018-2023.

4. Arah Kebijakan sebelum dan setelah perubahan RPJMD tahun 2018 – 2023

Arah kebijakan sebelum dan setelah perubahan menyesuaikan dengan tujuan, sasaran dan strategi RPJMD tahun 2018-2023, ada beberapa strategi sebelum dan setelah perubahan tidak ada perbedaan.

Perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD tahun 2018-2023 ini terjadi disebabkan oleh adanya pergantian Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dari periode 2016-2021 menjadi periode 2021-2026 sehingga menyesuaikan dengan Renstra Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan kepada isu-isu Kementerian Republik Indonesia terkini.



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Setelah perubahan

VISI :Dengan Kebersamaan Kita wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera			
MISI V :Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan Ibu,anak dan gizi masyarakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas upaya promotive dan preventive dalam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).	Penguatan kerjasama dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kesehatan ibu,anak dan gizi masyarakat
			Meningkatkan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pelaksanaan Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan
			Peningkatan upaya promotiv dan preventif dengan dukungan bantuan Operasional kesehatan
			Mengupayakan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat kota Sawahlunto.
		Penanganan dan pengendalian penyakit serta kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di kota Sawahlunto	Peningkatan pencegahan, pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan penguatan kerjasama dengan mitra kerja dibidang kesehatan
			Penguatan dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan kegiatan KLB



	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK)	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM dalam memberikan pelayanan
			Melakukan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dengan perekrutan dan pemerataan tenaga kesehatan termasuk pengembangan sistim karir dan penjurangan dengan dukungan finansial dan non finansial.
			Memperkuat kerjasama dengan daerah /instansi lain sebagai upaya peningkatan kualitas SDM Kesehatan dalam melayani masyarakat
			Pengembangan sistim pengelolaan SDM dalam upaya pengendalian dan pengawasan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
			Menyusun dan menetapkan standar pelayanan kesehatan, standar sarana, prasarana dan alat kesehatan serta pengembangan sistim monitoring dan evaluasi.
	Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan kualitas kependudukan	Menyusun Grand Design Pembangunan kependudukan (GDPK)
			Meningkatkan Edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian Penduduk
		Meningkatkan kualitas pembangunan Keluarga berencana dan Ketahanan Keluarga	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) yang kompresensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
			Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga



STUNTING	Menurunnya prevalensi stunting	Konvergensi Penanganan Stunting	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan
			Meningkatkan kualitas gizi ibu hamil dan menyusui
			Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak



Dari tabel 5.1 dan 5.2 terdapat adanya perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebelum dan setelah perubahan Renstra, pada tabel 5.2 tujuan lebih diperluas pengertiannya sehingga bisa mencakup semua aspek kesehatan yang akan di capai, sementara untuk sasaran, strategi serta arah kebijakan lebih memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diharapkan dan menentukan arah kebijakan yang akan dicapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan setelah perubahan lebih diperluas pengertiannya dan diperkecil pencapaian atau hasil yang diharapkan.



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1

Capaian Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan 2020 Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Kota Sawahlunto (sebelum perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
						Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi			
							kinerja	anggaran (Rp)		kinerja	anggaran (Rp)		kinerja	anggaran (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Tersedia nya Hidup Sehat Bagi Masyarakat		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	220.343	100	111.0	4.67	100	1.00	19.15		
			Penatalaksanaan ibu hamil Kek dan Balita KEP	Persentase ibu hamil yang KEK dan Balita KEP yang dimonitoring (%)	100	100		37.177	100	103.7	4.67	100	0	0		
			Pembentukan Pos Gizi	Jumlah Pos Gizi yang di bentuk	n/a	n/a	12	36.288	n/a	n/a	0	n/a	0	0		



			Orientasi dan Evaluasi E-PPGBM	Persentase hasil entry penimbangan massal melalui E-PPGBM	n/a	n/a	95	16.498	n/a	n/a	0	n/a	0	0		
			Pelaksanaan Hari Gizi Nasional (HGN)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali)	n/a	n/a	1	130.38	n/a	n/a	0	1	1.00	19.15		
			Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70	70	80	1103.00	74	48.00	167.17	76	31.00	9.00		
			Pelatihan dokter kecil dan KKR	Jumlah dokter kecil dan KKR yang dilatih(Orang)	995	995		70	995	995	58.43	-	0	0		
			Rehabilitasi Medik Berbasis Masyarakat untuk anak CP dan ABK	Anak CP dan ABK yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	70	70		1033	74	74.5	108.74	76	31	9		
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	70	70	80	107.00	70	38.1	16.22	75	0.00	0.00		
			Pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan	70	70	80	107.00	70	38.1	16.22	75	0	0		



			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian balita per 1000	2.77	2.51	1.75	4153.69	2.35	27.10	65.05	2.17	22.6	52.91		
				Jumlah kematian ibu	0	0	0		0	3	0.00	0	2	0		
			Penatalaksanaan dan penanggulangan kejadian luar biasa pada ibu dan Anak	Komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	85	85	100	57.943	100	93.3	3.98	100	100	3.415		
			Review Maternal dan Perinatal	Terlaksananya kegiatan review maternal dan perinatal (Kali)	1	1	2	44.0625	2	1	6.86	2	0	0		
			Skrinning Hipotiroid Kongenital	Bayi yang dilaksanakan Skrinning Hipotiroid Kongenital (%)	70	75	90	344	85	76.3	47.33	85	50.39	37.446		
			Fasilitasi Pelatihan APN bagi Dokter dan Bidan	Jumlah dokter dan bidan terlatih APN sesuai standar	10	10	10	682	10	0	0.00	10	0	0		
			Pertemuan koordinasi program Kesga Gizi	Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi program kesga gizi (Kali)	1	0	1	43.73	1	1	6.88	1	0	0		



			Bantuan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapat jampersal (%)	70	90	95	2981.953	90	0	0.00	90	6.7	12.05		
				terlaksananya Monitoring evaluasi pelaksanaan Kelas Keluarga (%)	n/a	n/a		0	n/a	0	0.00	0	0	0		
			Program Upaya Kesehatan Kerja	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	66.67	66.67	-	15	66.67	100	10.13	-				
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja	Terfasilitasinya kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat	66.67	66.67	-	15	66.67	100	10.13	-				
			Program Upaya Kesehatan Olah Raga	Persentase terbentuknya pos kesehatan olah raga di puskesmas	66.67	66.67	-	6.5	83.33	100	4.32	-				
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Olah Raga	Terfasilitasinya kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat	66.67	66.67	-	6.5	83.33	100	4.32	-				



			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	2,506.37	100	100.00	205.34	100	100	125.29		
				Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai standar	100	100	100		100	100		100	100			
				Penderita HIV/Aids yang mendapat pelayanan HIV/Aids sesuai standar (%)	100	100	100		100	100		100	100			
			Pengendalian Penyakit TB	Case Detection Rate (CDR) TB (%)	67.8	0.503	> 70	435.65	61	26.6	58.11	65	28	54.49		
			Pengendalian Penyakit Kusta	Persentase kasus baru kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	100	0.51	100	202.55	100	0	3.90	100	0	9.9		
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Disebabkan Vektor	Persentase kasus-kasus penyakit tular vektor dan zoonosis yang tertanggulangi	100	100	-	61	100	100	44.37		100	3		
			Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)	dokumen	1	1	1	269	1	1	17.90	1	0	1.1		



			Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	77.4	68	95	401.1745	93	62.7	47.76	95	85	3.97		
				Persentase murid SD yang mendapatkan booster imunisasi	89.7	82	95		95	85.5	0.00	95				
			Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB	Persentase tertanggulangnya KLB/Wabah penyakit menular	100	100	100	342	100	100	25.75	100	100	29.13		
			Sosialisasi Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi (Orang)	0	0	100	145	100	45	7.57	100	0	0		
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Disebabkan Vektor dan Zoonosis	Persentase kasus-kasus penyakit tular vektor dan zoonosis yang tertanggulangi	100	100	100	391	0		0.00	100	0	0		
				cakupan POPM Kecacingan (%)	0	1	75	0	75	99.98		75				



				Persentase kasus gigitan HPR yang dilakukan pencucian luka sesuai protap	100	0.9	100	0	1	1		100			
				API malaria	0.02	0	< 1	0	< 1	0.02		< 1			
				Insiden Rate penyakit DBD per 100.000 penduduk	180	37	49	0	49	121		49			
			Pengendalian Faktor Resiko dan peanggulangan Penyakit HIV/AIDS	persentase Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	100	100	100	259	100	77.8		100	100	23.7	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100	100	100	641.80	100	100.00	45.87	100	88.00	29.00	
				Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100	100	100		100	100	0.00	100	16.72		



				Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100	100	100		100	100	0.00	100	150			
			Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.(%)	36.7	46.1	50	340.3	50	6.98	40.69	50	5.5	22		
				Jumlah POSBINDU PTM di Desa/ kelurahan	33	33	37	0	33	30	0	34				
			Kegiatan Deteksi dini dan penanggulangan kesehatan jiwa dan Napza	Gangguan jiwa dan NAPZA yang ditanggulangi (%)	100	100	100	166.5	100	100	5.18	100	100	4		
			Kegiatan deteksi dini dan penanggulangan Kesehatan indra (penglihatan dan pendengaran)	Kasus indra dan pendengaran yang ditanggulangi (%)	n/a	n/a	100	135	100	0	0	100	100	3		



Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	89.92	90		217.86	92	92	123.66	-		-		
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	76	77	0		78	92.20		0				
	Penyelenggaraan Kegiatan STBM	Jumlah desa/kelurahan yang STBM (desa/kel)	22	26		19.96	28	37	0	-				
	Penyehatan TTU	Tempat-tempat Umum Memenuhi syarat kesehatan (%)	75	65		5.96	70	86.8	5.92	-				
	Operasional Forum Kota Sehat dan Bersih	Terfasilitasinya kegiatan penyelenggaraan kota sehat (bulan)	12	12		141.94	12	12	79.74	-				
	Pemeriksaan Rumah dan sarana sanitasi	Rumah Sehat (%)	80	75		50	77	81.9	38.00	-				



			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	89.92	90	100	938.37	93	-	-	94	94.0	25.19		
				Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	76	77	100		80	-	-	81	91.0	-		
			Pemeriksaan Rumah dan sarana sanitasi	Rumah Sehat (%)	80	75	65	215.02	77	-	-	78	75.7	-		
			Penyelenggaraan Kegiatan STBM	Jumlah Desa Yang ODF (Desa/Kel)	22	22	27	86.00	23	-	-	24	25.0	-		
				Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	26	26	30		0	-	-	27	37.0			
				Jumlah desa/kelurahan STBM (desa/kel)	0	0	4	0	0	-	-	1	5.00			
			Penyehatan TTU	Tempat-tempat Umum Memenuhi syarat kesehatan (%)	75	65	78	25.85	70	-	-	72	84.3	-		



			Fasilitasi Forum Kota Sehat dan Bersih	Status Kota Sehat Sawahlunto	Wiwirda	Wiwirda	Wistara	611.50	Wistara	-	-	Wistara	-	25.19		
			Program Peningkatan Kualitas Air	Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%)	89	70	80	1250.56	72	100	119.69	74	99	114.92		
			Pembinaan Pengusaha Depot Air Minum	Depot Air Minum mendapatkan stiker layak sehat (%)	100	100	100	85.3	100	100	7.53	100	100	-		
			Pembinaan BPSPAMS	Jumlah BPSPAMS yang mandiri (sarana)	7	7	12	55.36	8	6.0	9.06	9	10.0	-		
			Pemeriksaan Kualitas Air Minum	Persentase Kualitas Air Minum masyarakat yang memenuhi syarat	23	24	40	212.40	25	94.3	21.43	26	83.0	13.42		
			Pengelolaan Limbah Medis /B3	Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standard	6	6	30	897.50	6	6.0	81.67	6	6.00	101.50		
	Meningkatnya Keamanan Obat dan Makanan di Masyarakat		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%)	91	75	81	383.25	77		33.08	78	-	-		



			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya	Sarana distribusi obat yang memenuhi syarat)(%)	91	90	95	159.30	91	100	21.65	92	-	-		
				Sarana distribusi makanan minuman yang memenuhi syarat)(%)	91	90	95	0	91	100	-	92	-	-		
			Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah	Persentase sarana pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat (%)	90	90	92	43.10	90	-	-	90	-	-		
			Bimtek Penggunaan Obat Yang Rasional	Jumlah tenaga kesehatan/ masyarakat yang mengikuti bimtek (orang)	n/a	50		15.00	30	30	7.48		-	-		
			Penggunaan obat yang rasional	Persentase penggunaan obat yang rasional	0	0	72	64.65	0	-	-	70	-	-		
			Pengawasan Alkes dan PKRT	Sarana distribusi alkes dan PKRT yang diawasi (%)	n/a	n/a	75	90.51	n/a	-	-	70	-	-		
			Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan/ Minuman	Tempat pengelolaan makanan/minuman yang diperiksa (%)	100	75		10.68	76	100	3.95					



			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	90	90	95	145.65	91	100	7.46	92	88.1	8.70		
			Pemeriksaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan/ Minuman	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	100	75	80	66.00	76	0	0	77	-	-		
			Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah tangga	Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat kesehatan	98	90	92	79.65	90	100	7.46	91	100	8.70		
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berperilaku Hidup Bersih Sehat		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKM yang Aktif	72	75	90	3365.47	78	100	311.31	81	85	32.50		
			Fasilitasi Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan (kali)	2	3	19	410.00	3	3	67.71	3	-	-		
			Pengadaan sarana dan prasarana dan media promosi hidup sehat	Jumlah media promosi yang dicetak (item)	10	8	10	460.00	6	6	41.52	6	-	-		



			Orientasi krida dan perkemahan Saka Bakti Husada tingkat cabang	Jumlah anggota pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan (orang)	80	75	140	335.00	80	120	49.13	100	-	-		
			Pemantapan pelaksanaan teknis program desa/kelurahan siaga aktif	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri (desa/Kel)	0	0	7	222.00	1	0	28.98	1	-	-		
			Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat KIE	24	37	37	190.47	37	15	27.87	37	-	-		
			Fasilitasi Posyandu Award dan Posyandu Remaja	Jumlah kategori yang dinilai (kategori)	0	5	6	245.00	4	4	29.73	6	-	-		
				Jumlah posyandu remaja yang dibentuk (buah)	0	0	37		0	-	-	6	-	-		
			Fasilitasi indikator kesehatan pada KKG PKK KB Kesehatan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan KKG PKK KB Kes (desa/Kel)	4	4	20	337.00	4	4	26.08	4	4.00	8.90		
			Penjaringan kesehatan murid pada SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA	Murid yang diperiksa kesehatannya (%)	100	100	100	225.00	100	100	14.99	100	20.0	19.10		



			Fasilitasi kegiatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kali)	1	1	5	186.00	1	1	25.30	1	1.00	4.50		
			Fasilitasi kemitraan bidang kesehatan dengan ormas dan dunia usaha	Jumlah ormas dan dunia usaha yang bermitra (buah)	3	3	6	110.00	0	0	0	0	-	-		
			Fasilitasi peraturan daerah bidang kesehatan	Jumlah kebijakan yang mendukung PHBS (buah)	2	2	7	85.00	0	0	0	0	-	-		
			Fasilitasi Kegiatan Germas dan Kampanye Hidup Sehat	Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan (kali)	0	0	18	560.00	0	0	0	2	-	-		
				Jumlah kegiatan pameran kesehatan (kali)	0	0	8	0	0	0	0	2	-	-		
				Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (kali)	0	0	16	0	0	0	0	2	-	-		
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Keluarga Sehat (%)	25	27		4199.52	29	24	18,152.94	31		6,564.58		
			Pembinaan dan Pengawasan JKN	persentase cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN (orang)	15%	15%		20	15%	25	7.34					



			Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan Kesehatan Sumbar Sakato	Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato (orang)	13,003	13,003		2.895	13,003	13,003	4,072.95				
			Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Kota sawahlunto	Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota sawahlunto (orang)	10,172	9,000		5,070.9	17,000	18,897	7,073.50				
			Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah Puskesmas yang ber prestasi dan tenaga kesehatan teladan	1 fasilitas kesehatan 4 tenaga kesehatan teladan	1 fasilitas kesehatan an 4 tenaga kesehatan teladan		39.5	1 fasilitas kesehatan an 9 tenaga kesehatan teladan	1	13.92	1 fasilitas kesehatan an 9 tenaga			
			Pelatihan Penanggulangan kegawat daruratan bagi tenaga kesehatan	Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat (unit)	10 orang	10 orang		30	10	5	24.15	12 orang			
			Penyelenggaraan Sistik Penanggulangan gawat darurat terpadu	Jumlah Unit Penanggulangan gawat darurat Terpadu (unit)	n/a	n/a	1 unit	428.05	1	1	14.41	1 unit	1.00	46.86	
			Peningkatan kapasitas Program Indonesia sehat Melalui Pendekatan keluarga (PIS-PK)	Persentase keluarga sehat	25%	27%	37%	184.32	29%	0	0	29	24.0	1	



				persentase keluarga yang dikunjungi untuk PIS PK	84	96	1	0	100	100.00		100	50.0		
			Penyelenggaraan Bantuan operasional kesehatan	Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggarakan Bantuan operasional kesehatan	7	7	7	19,557.29	7	7	3,590.02	7	7.00	6,498.92	
			Pelayanan Kesehatan hari Libur Lebaran	Laporan Kegiatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	77.5	1	1	8.55	1 laporan	1.00	10.90	
			Pelayanan Kesehatan even daerah/Nasional (P3K)	Laporan Kegiatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	141.5	1	1	17.90	1 laporan	1.00	1	
			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Talawi	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	8645	9100	18526	1026.07	14251	13,279	965.00				
			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Silungkang	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	5,546	5,837	0	564.40	7839	7,093	628.04				
			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kolok	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	3,780	3,978	0	366.62	5092	4,686	401.96				



			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Sungai Durian	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	5,568	5,861	0	624.74	8677	8,154	598.74				
			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kampung Teleng	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	4,191	4,411	0	484.20	6725	6,132	405.30				
			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Lunto	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	3,691	3,885	0	358.20	4975	4,621	323.84				
			Monitoring garam beryodium tingkat pasar dan Desa/kelurahan	Persentase garam ditingkat pasar sawahlunto yang beryodium	98.7	96.7	98	52.63	98	97	7.33	98	96.4	6.50	
				Persentase rumah tangga yang menggunakan garam beryodium	100	99.8	98	0	98	100	-	98			
			Pelatihan dokter kecil dan KKR	Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih (orang)	995	995	995	301.7	0	-	-	995	-	-	
			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal di masyarakat yang terfasilitasi (kegiatan)	4	4	16	82	0	-	-	3	-	-	



			Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Olah Raga	Jumlah kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok di masyarakat yang terfasilitasi	4	4	15	90	0	-	-	2	-	-		
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (Puskesmas)	n/a	n/a	6 Puskesmas	238.96	6 Puskesmas	-	-	6 Puskesmas	-	-		
			Surveilans Penanggulangan bencana	persentase penanggulangan bencana yang teratasi	n/a	100%		100%	100%	-	-		-	-		
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya profesionalisme aparatur yang mengikuti pelatihan/ pertemuan (bulan)	93	93	-	112	94		62.77	-	-			
			Pendidikan dan pelatihan formal	Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan)	12	12	-	100	12		55.77	-	-	-		



			Pertemuan tim penilai kredit point dan tenaga fungsional tertentu	Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali)	2	2	-	12	2		7.00	-	-	-	
			Program Peningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	93	93	98	478.53	-	-	-	95	92.60	-	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Terfasilitasinya kegiatan kursus-kursus singkat, on the job training, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis (bulan)	12	12	12	427.27	-	-	-	12	-	-	
			Pertemuan tim penilai kredit point dan tenaga fungsional tertentu	Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan (kali)	2	2	2	51.26	-	-	-	2	-	-	
	Terpenuhi ya Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%)	98.1	98.7	96	1,401.95	88	100	230.60	90	95.0	128.66	
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator di puskesmas	86	86	95	1062.03	88	100	230.60	90	91.0	99.92	



			Distribusi obat dan e-logistic	Jumlah distribusi obat dan e-logistic (bulan)	12	12	12	339.93	12	-	12	12	28.74			
	Terlaksananya operasional prosedur pelayanan kesehatan sesuai standar		Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu sesuai Standar	69	71		59,331.29	73	71.63	5,358.42	75	74	20,406.50		
			Pengadaan alat kedokteran/kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan (%)	69	69	76	1,062.03	70	70.0	191.92	71	71	196.60		
			Pemeliharaan Rutin/berkala alat kedokteran/kesehatan	Jumlah Alat Kedokteran Kesehatan yang dipelihara (jenis)	20	20	26	796.52	20	20.0	135.54	22	11	27.31		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Keluarga Berencana (DAK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah paket kegiatan yang diadakan	5	5	25	5,345	5	5.0	911.75	5	5.00	853.59		
			DAK Murni pendamping dan operasional	Jumlah Paket yang dilaksanakan (paket)	100	100	100	52,127.75	100	100.0	4,119.22	100	141	19,329		



			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	66.6	100	1	3,932.90	100%	100	402.43	100	100	256.18		
			Akreditasi Puskesmas	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	66.6	100	1	3,120.40	100%	100	402.43	100	100	256.18		
			Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah Puskesmas yang ber prestasi dan tenaga kesehatan teladan	1 fasilitas kesehatan 4 tenaga kesehatan teladan	1 fasilitas kesehatan 4 tenaga kesehatan teladan	1 fasilitas kesehatan 9 tenaga kesehatan teladan	170.75	1 fasilitas kesehatan 9 tenaga kesehatan teladan	-	-	1 fasilitas kesehatan 9 tenaga	-	-		
			Pelatihan Penanggulangan kegawat daruratan bagi tenaga kesehatan	Jumlah Petugas yang memiliki sertifikat	10 orang	10 orang	64 orang	165	10 orang	-	-	12 orang	-	-		
			Surveilans Penanggulangan bencana	persentase penanggulangan bencana yang teratasi	n/a	n/a	1	66.75	n/a	-	-	100%	-	-		
			Penyusunan buku profil kesehatan	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	1	260	1	-	-	1	-	-		
			Pendataan keluarga	Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru		16000	20000	150	18000	-	-	18500	-	-		



	Tersedianya Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat		Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	100	100	100	50689.49	100	97.88	18.80	100	96.07	14,735.03		
			Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Jumlah pasien rujukan yang di layani	100	100	100	250	100	100.00	18.80	100	100.00	30.30		
			Pembinaan dan Pengawasan JKN	persentase cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN	15%	15%	16%	86.00	-	-	-	16%	-	-		
			Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan Kesehatan Sumbar Sakato	Jumlah peserta jaminan kesehatan sumbar sakato	13,003	13,003	13,003	11,955.20	-	-	-	13,003	13,003	4,151.26		
			Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Kota sawahlunto	Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota sawahlunto	10,172	9,000	20,000	22,106.00	-	-	-	19,000	64,147	6,599.62		
			Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Talawi	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	8645	9100	18526	4894.36	-	-	-	15676	19,796	1,072.67		



		Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Silungkang	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	5,546	5,837	10,191	2,692.20	-	-	-	8623	11,938	777.27		
		Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kolok	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	3,780	3,978	6,620	1,748.78	-	-	-	5601	8,099	468.93		
		Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Sungai Durian	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	5,568	5,861	10,846	2,948.71	-	-	-	9545	5,663	673.71		
		Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kampung Teleng	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	4,191	4,411	8,743	2,309.63	-	-	-	7398	11,679	555.28		
		Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Lunto	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	3,691	3,885	6,468	1,698.61	-	-	-	5473	7,360	405.99		
	Meningkatnya Kualitas Kependudukan	program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	62	63		137.24	64	64	86.58					



			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%)	n/a	n/a	70	708.38	n/a	-	-	60	90.00	-		
			fasilitasi integrasi BKB dengan Posyandu dan Paud	Jumlah Kader KB yang dibina dan terampil	85	85	85	845.616	83	83	86.58	85	-	-		
			program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	34.3	32			30.4	30.4	145.31					
			program kesehatan reproduksi remaja	Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun	34.3	32	28	905.11	30.4	-	-	29.73	2.30	24.73		
			pembinaan dan temu pusat informasi konseling remaja (PIK R)	Jumlah PIK R yang terbina	23	23	26	292.07	23	23	39.83	24	21.00	11.00		
			pembinaan dan jambore Saka Kencana	jumlah peserta saka kencana yang menjadi anggota dan dibina	25	25	30	284.17	30	20	36.77	30	7.00	13.73		



			Pemilihan Duta Genre tingkat Kota Sawahlunto	Jumlah Peserta /Duta Genre yang ikut dalam kompetensi Pemilihan Duta Genre	n/a	50	60	371.675	60	64	68.71	60	-	-		
			fasilitasi pembentukan sekolah siaga kependudukan (SSK)	Persentase Sekolah Menengah Atas dengan status sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	n/a	1	10	159.30375	6	0	0	7	-	-		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi	63	64	70	2392.22	65	10.02	301.03	412.51	301.03	7.29		
			fasilitasi forum kader KB	Jumlah Kader KB yang dibina dan terampil		232	383	1827.90	383	383	301.03	344.23	301.03	-		
			pembentukan / Pembinaan kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina	5	4	10	175	2	-	-	25.00	-	-		
			pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah Peserta/Keluarga yang berpartisipasi dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	1000	1000	400	229.84	1000	845	-	43.28	-	-		



			Pembinaan BKR,BKL	Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina	4	4	37	159.47	0	-	-	-	-	-		
			Program peningkatan pelayanan Kb	Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi	60	62	-	1067.11	64	10.02	813.17	1,067.11	813.17			
			Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru	630	857	-	80	857	602	32.77	80.00	32.77			
			jambore / temu kreatifitas program KKBPk	Jumlah Peserta (PLKB,IMP dan Kader yang di fasilitasi)	10	10	-	50	30	10	47.31	50.00	47.31			
			operasional balai penyuluhan KB dan alat kontrasepsi	Jumlah Balai Penyuluhan dan gudang Alkon yang difasilitasi	5	5	-	937.11	5	5	733.09	937.11	733.09			
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	60	62	69	4,308.55	64	-	-	-	-	63.30		
			Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai Peserta KB baru	630	857		344.61	857	-	-		-	686.00		



		jambore / temu kreatifitas program KKBPk	Jumlah Peserta (PLKB,IMP dan Kader yang di fasilitasi)	10	10	30	215.51	30	-	-		-	-		
		operasional balai penyuluhan KB dan alat kontrasepsi	Jumlah Balai Penyuluhan dan gudang Alkon yang difasilitasi	5	5		3,748.43	5	-	-		-	5		
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan data di bidang kesehatan dan KB (%)	100	100	100	43.212	100	100	35.78	100	0	0		
		Penyusunan buku profil kesehatan	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	1	24	1	1	17.42	-				
		Pendataan keluarga	Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru	16000	16000	20000	19	18000	5,673	18.36	-				



Capaian program, kegiatan dan pendanaan sebelum perubahan RPJMD tahun 2018-2023 yang realisasi pencapaian target program dan kegiatan selama 3 tahun terakhir tidak tercapai antara lain:

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
3. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Anak
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular
6. Program Peningkatan Kualitas Air
7. Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tidak tercapainya target program dan kegiatan yang diharapkan, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang melaksanakan pertemuan, monitoring evaluasi, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kualitas air pada tahun 2019 dan 2020, dan pada tahun tersebut merupakan masa Pandemi Covid 19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar, sehingga bentuk kegiatan yang mendatangkan orang banyak tidak dapat dilakukan, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target program dan kegiatan. Diharapkan dengan telah dilaksanakan vaksinasi Covid 19 kepada seluruh masyarakat Indonesia, dapat mendorong terbentuknya *Herd Immunity* masyarakat yang berdampak pada pencapaian target program dan kegiatan nantinya.



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021 sampai dengan 2023 Perangkat Daerah
 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
 Kota Sawahlunto (setelah perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)	
-1	-2	-3					-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			32,785,408,095		18,286,261,818		22,406,288,345		73,477,958,258		



		1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		32,637,297,545		18,204,501,818		22,276,838,345		73,118,637,708	
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	906	100	60,922,000	100	67,406,000	0	-	100	128,328,000
								Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	1263	99,226,300	1263	99,226,300
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	111	100	15,765,000	100	42,152,000	0	0	100	57,917,000



							Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	159	44,259,600	159	44,259,600			
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	191	100	5,265,000	100	28,800,500	0	0	100	34,065,500		
							Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	254	30,240,525	254	30,240,525			
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	131	100	21,405,000	100	68,730,500	0	0	100	90,135,500		
							Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		0	-	0	-	222	72,167,025	222	72,167,025			



							n sesuai standar (jumlah)												
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	312	100	48,837,000	100	84,790,000	0	0	100	133,627,000		
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	400	89,029,500	400	89,029,500			
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	93	100	35,815,110	100	64,661,000	0	0	100	100,476,110		
							Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	137	67,894,050	137	67,894,050			



		1	2	2	2.	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah ibu hamil yang dilayani sesuai standar (persentase)	68	1	21,768,400	100	64,082,100	0	0	100	85,850,500
					02			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	0	-	0	-	91	67,286,200	91	67,286,200
		1	2	2	2.	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan jampersal (%)		9	91,680,000	0	-	0	-	92	91,680,000
								Komplikasi kebidanan yang ditangani		1		0		0		100	-
								Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	980	0	0	100	77,183,799	0	-	100	77,183,799



							(persentase)												
							Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1205	91,312,900	1205	91,312,900				
		1	2	2	2.	2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (persentase)	127	9,245,000	100	1,500,000	0	-	100	10,745,000				
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	0	-	0	-	151	1,575,000	151	1,575,000				
		1	2	2	2.	2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	186	7,525,000	100	-	0	-	100	7,525,000				
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	0	-	0	-	0	-	100	7,525,000				



							pelayana n sesuai standar (persenta se)											
							Jumlah ibu bersalin yang mendapa t pelayana n kesehata n sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	235	-	235	-		
	1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah ibu bersalin yang mendapa tkan pelayana n sesuai standar (persenta se)	161	100	-	100	7,000,000	0	-	100	7,000,000		
							Jumlah ibu bersalin yang mendapa t pelayana n kesehata n sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	212	7,350,000	212	7,350,000		
	1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah ibu bersalin yang mendapa tkan	328	100	3,075,000	100	5,250,000	0	-	100	8,325,000		



						pelayanan sesuai standar (persentase)									
						Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	390	5,512,500	390	5,512,500	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (persentase)	105	100	8,020,000	100	4,152,000	0	100	12,172,000	
						Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	130	4,359,600	130	4,359,600	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah ibu bersalin yang mendapat	73	100	9,300,000	100	3,089,000	0	100	12,389,000	



	1	2	2	2.	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (persentase)	122	100	8,050,000	100	16,180,000	0	-	100	24,230,000		
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	138	16,989,000	138	16,989,000		
	1	2	2	2.	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (persentase)	184	100	14,562,500	100	0	0	-	100	14,562,500		
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)		0	-	0	0	202	-	202	-		
	1	2	2	2.	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (persentase)	157	100	12,457,000	100	150,000	0	-	100	12,607,000		



							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	195	157,500	195	157,500		
	1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (persentase)	317	100	0	0	-	100	8,827,000			
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	0	-	0	0	380	-	380	-		
	1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (persentase)	104	100	4,050,000	0		100	11,300,000			
							Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	118	4,252,500	118	4,252,500		
	1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UPTD PUSKESMAS	Jumlah bayi baru lahir yang	73	100	150,000	0	-	100	400,000			



					LUNTO)	ditangani sesuai standar (persentase)											
						Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	77	157,500	77	157,500			
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	1817	100	54,348,500	100	28,372,000	0	100	82,720,500			
						Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (persentase)	95	95			0		95				
						Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	3944	115,790,600	3944	115,790,600			



		1	2	2	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	267	100	18,390,000	100	11,400,000	0	-	100	29,790,000		
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	415	11,970,000	415	11,970,000		
		1	2	2	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	151	100	32,882,000	100	12,600,000	0	-	100	45,482,000		
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	726	13,230,000	726	13,230,000		



		1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	487	100	22,001,750	100	9,145,000	0	-	100	31,146,750		
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	711	9,602,250	711	9,602,250		
		1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	534	100	15,585,950	100	11,850,000	0	-	100	27,435,950		
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	1284	12,442,500	1284	12,442,500		



		1	2	2	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	223	100	6,788,000	100	16,800,000	0	-	100	23,588,000		
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	542	17,640,000	542	17,640,000		
		1	2	2	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	155	100	18,786,000	100	10,700,000	0	-	100	29,486,000		
								Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	266	11,235,000	266	11,235,000		



		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Persentase anak sekolah yang mendapatkan pelayanan imunisasi (persen)	95	35,846,980	0	-	0	-	95	35,846,980		
								Persentase murid yang diperiksa kesehatannya (%)	100		0		0		100			
								Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (persentase)	0	-	100	60,535,500	0	-	100	60,535,500		
								Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	9957	113,312,450	9957	113,312,450		



		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (persentase)	100	29,220,000	100	49,020,000	0	-	100	78,240,000		
								Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1323	51,471,000	1323	51,471,000		
		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (persentase)	100	13,870,000	100	22,705,000	0	-	100	36,575,000		



							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1762	23,840,250	1762	23,840,250		
		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	1000	20,295,000	100	16,500,000	0	-	100	36,795,000		
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1734	17,325,000	1734	17,325,000		



		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (persentase)	100	25,539,235	100	70,396,000	0	-	100	95,935,235		
								Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	2609	73,915,800	2609	73,915,800		
		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (persentase)	100	22,160,000	100	34,010,750	0	-	100	56,170,750		



							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1445	35,711,300	1445	35,711,300		
		1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	1000	18,620,000	100	31,834,400	0	-	100	50,454,400		
							Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1084	33,426,100	1084	33,426,100		



							skrining kesehatan sesuai standar												
		1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	13,437,600	100	0	0	-	100	13,437,600			
		1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	5,500,000	100	0	0	-	100	5,500,000			
		1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	3,740,000	100	0	0	-	100	3,740,000			
		1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (persentase)	4357	0	-	100	68,284,720	0	-	100	68,284,720		



							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	4259	93,913,950	4259	93,913,950		
		1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (persentase)	1060	100	23,590,000	100	35,138,000	0	100	58,728,000		
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	255	36,894,900	255	36,894,900		
		1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	385	100	22,640,000	100	1,340,000	0	100	23,980,000		



						(persentase)											
						Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	744	1,407,000	744	1,407,000			
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPTD PUSKEMAS SILUNGKANG)	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (persentase)	1090	100	17,824,400	100	19,240,000	0	-	100	37,064,400		
						Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	709	20,202,000	709	20,202,000			
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UPTD PUSKEMAS TALAWI)	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan	659	100	26,400,600	100	25,560,000	0	-	100	51,960,600		



							n sesuai standar (persentase)											
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1579	26,838,000	1579	26,838,000			
	1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut(UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (persentase)	527	100	6,788,000	100	22,790,000	0	-	100	29,578,000		
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	423	23,929,500	423	23,929,500			



							Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (persentase)	636	100	20,050,000	100	21,090,000	0	-	100	41,140,000		
							Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)		0	-	0	-	549	22,144,500	549	22,144,500		
							Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)		100	4,534,250	100	20,087,500	0	-	100	24,621,750		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai		0	-	0	-	1445	45,179,375	1445	45,179,375		



							standar (jumlah)												
		1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			
		1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			
		1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			
		1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	5,117,800	100	0	0	-	100	5,117,800			



							n sesuai standar												
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-					
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-					
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase)	100	4,062,000	100	9,000,000	0	-	100	13,062,000					
						Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	0	-	0	-	498	31,525,000	498	31,525,000					



							(jumlah)								
	1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000	-	100	0	0	-	100	-
	1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000	-	100	0	0	-	100	-
	1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000	-	100	0	0	-	100	-
	1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000	1,817,800	100	0	0	-	100	1,817,800



							Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)												
		1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	6,000,000	100	0	0	-	100	6,000,000			
		1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			
		1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai	100	-	100	0	0	-	100	-			



							standar												
		1	2	2	2.	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			
		1	2	2	2.	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			
		1	2	2	2.	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-			



						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah Case Detection Rate (CDR) (persentase)	70	74,445,000	70	48,440,000	0	-	70	122,885,000		
							Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	557	143,862,000	557	143,862,000		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah orang yang terduga TB yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	-	70	0	0	-	70	-		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah orang yang terduga TB yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	750,000	70	0	0	-	70	750,000		



						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV (persentase)	100	27,805,110	100	35,813,800	0	-	100	63,618,910		
							Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	0	-	0	-	1284	97,604,450	1284	97,604,450		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan	100	-	100	0	0	-	100	-		



							kesehata n sesuai standar											
		1	2	2	2.02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapa tkan pelayana n kesehata n sesuai standar	1 0 0	300,000	100	0	0	-	100	300,000		
		1	2	2	2.02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapa tkan pelayana n kesehata n sesuai standar	1 0 0	-	100	0	0	-	100	-		
		1	2	2	2.02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapa tkan pelayana n kesehata n sesuai standar	1 0 0	-	100	0	0	-	100	-		



							Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	0	0	-	100	-		
		1	2	2	2.02	1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	4	636,929,050	0	0	0	-	4	636,929,050		
		1	2	2	2.02	1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	0		100	171,449,250	0	-	100	171,449,250		
							Kejadian luar biasa yang ditanggulangi (persentase)	0									
							Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang kondisi kejadian luar biasa	0	-	0	-	1	180,021,713	1	180,021,713		



							(KLB) sesuai standar (dokumen)												
		1	2	2	2.02	1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	100	59,424,000	0	-	100	59,424,000			
								Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	0	0	0	-	1	62,395,200		62,395,200			
								Jumlah kejadian luar biasa yang ditanggulangi (kali)	1	184,621,250	0	-	0	-	1	184,621,250			



							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	100	87,860,000	0	-	100	87,860,000		
	1	2	2	2.02	1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)		0	0	0	-	1	92,253,000	1	92,253,000		
							Jumlah kejadian luar biasa yang ditanggulangi (kali)	1	198,290,000	0	-	0	-	1	198,290,000		
	1	2	2	2.02	1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	100	63,924,000	0	-	100	63,924,000		



							mendapa tkan Pelayana n Kesehata n												
							Jumlah Pendudu k pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yan g mendapa tkan Pelayana n Kesehata n (kali)	0	0	0	-	1	67,120,200	1	67,120,200				
							Jumlah kejadian luar biasa yang ditanggul angi (kali)	1	203,232,000	0	-	0	-	1	203,232,000				
							Jumlah Pendudu k pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)yan g mendapa tkan Pelayana n Kesehata n	0	0	100	112,066,000	0	-	100	112,066,000				
1	2	2	2.	1	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPTD PUSKESMAS TALAWI)													



							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (kali)	0	0	0	-	1	117,669,300	1	117,669,300
							Jumlah kejadian luar biasa yang ditanggulangi (kali)	1	250,432,400	0	-	0	-	1	250,432,400
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	0	100	49,990,000	0	-	100	49,990,000
		1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)								
							Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang	0	0	0	-	1	52,489,500	1	52,489,500



							Jumlah kejadian luar biasa yang ditanggulangi (kali)	1	164,241,000	0	-	0	-	1	164,241,000
		1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	100	3,735,166,942	0	-	0	-	100	3,735,166,942
							Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	-	0	0	0	-	0	-



							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar (dokumen)	0	-	0	0	1	250,000,000	1	250,000,000		
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	13	161,770,000	0	0	0	-	13	161,770,000		
							Persentase pelayanan kesehatan gizi masyarakat	85		0		0		85	-		
							prevalensi stunting pada balita (persenta	0	-	18,4	335,001,500	0	-	18.4	335,001,500		



							n kesehata n gizi masyara kat												
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	prevalensi stunting pada balita (persentase)	18,4	36,226,000	18,4	47,330,000	0	-	18.4	83,556,000				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0	-	0	-	1	49,696,500	1	49,696,500				
	1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	prevalensi stunting pada balita (persentase)	18,4	48,003,000	18,4	45,578,500	0	-	18.4	93,581,500				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	0	-	0	-	1	47,857,400	1	47,857,400				



							yang terfasilitasi (kegiatan)											
							Pelayanan Kesehatan kebugaran kepada masyarakat (persentase)	6 Pusk	100	-	100	8,867,250	0	-	100	8,867,250		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (dokumen)		0	-	0	-	6	11,322,150	6	11,322,150		
							Jumlah Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat		0	0	100	7,040,000	0	-	100	7,040,000		
		1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPTD PUSKESMAS KOLOK)											



						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (dokumen)	0	0	0	-	1	7,392,000	1	7,392,000		
						Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal dimasyarakat yang terfasilitasi (kegiatan)	2	7,650,000	0	-	0	-	2	7,650,000		
						Jumlah Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	100	4,900,000	0	-	100	4,900,000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja		0	0	-	1	5,145,000	1	5,145,000		
	1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)										



							Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal dimasyarakat yang terfasilitasi (kegiatan)	2	2,537,000	0	-	0	-	2	2,537,000		
		1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	0	-	100	5,187,000	0	-	100	5,187,000		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (dokumen)	0	-	0	-	1	5,446,350	1	5,446,350		
							Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal dimasyarakat	2	3,764,900	0	-	0	-	2	3,764,900		



							akat yang terfasilitasi (kegiatan)												
		1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	100	9,550,000	0	-	100	9,550,000			
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (dokumen)	0	0	0	-	1	10,027,500	1	10,027,500			
								Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal dimasyarakat yang terfasilitasi (kegiatan)	2	2,696,000	0	-	0	-	2	2,696,000			



							Jumlah Pelayanan kesehatan kebugaran kepada masyarakat	0	0	100	1,902,000	0	-	100	1,902,000		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UPTD PUSKESMAS LUNTO)		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (dokumen)	0	0	0	-	1	1,997,100	1	1,997,100		
							Jumlah kegiatan kesehatan kerja pada kelompok kerja informal dimasyarakat yang terfasilitasi (kegiatan)	2	10,650,000	0	-	0	-	2	10,650,000		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)		Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	13	87,932,000	0	-	0	-	13	87,932,000		



							Persenta se lingkungan sehat (%)	79	0	0	79	-			
							Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/B3 sesuai standar (puskesmas)	6	6	155,986,877	0	-	6	155,986,877	
							RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs) (persentase)	98	-	98	-	0	-	98	-
							RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (SDGs) (persentase)	85	-	85	-	0	-	85	-
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	0	-	0	-	1	44,100,000	1	44,100,000



							n lingkungan (dokumen)											
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (SDGs) (persentase) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	85	17,161,000	85	20,500,000	0	-	85	37,661,000			
								0	-	0	-	1	21,525,000	1	21,525,000			
	1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (SDGs) (persentase)	85	25,675,000	85	20,585,000	0	-	85	46,260,000			



							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	0	-	0	-	1	21,614,250	1	21,614,250			
		1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (SDGs) (persentase)	85	17,654,000	85	20,125,000	0	-	85	37,779,000		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	0	-	0	-	1	21,131,250	1	21,131,250			
		1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPTD PUSKESMAS TALAWI)	RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (SDGs)	85	35,608,800	85	29,514,000	0	-	85	65,122,800		



		1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (SDGs) (persentase)	85	27,700,000	85	20,204,000	0	-	85	47,904,000		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (dokumen)	0	-	0	-	1	21,214,200	1	21,214,200		
		1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah kegiatan germas yang dilaksanakan akan (kali)	10	133,980,000	0	-	0	-	10	133,980,000		
								Promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat (persentase)	0	-	100	120,653,000	0	-	100	120,653,000		



							Terlaksana nanya pengelolan pelayana n promosi kesehata n (Dokume n)	0	-	0	-	1	44,750,250	1	44,750,250		
		1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	0	0	100	69,326,000	0	-	100	69,326,000		
							Terlaksana nanya pengelolan pelayana n promosi kesehata n (Dokume n)	0	0	0	-	1	72,792,300	1	72,792,300		
							Jumlah kegiatan Germas yang dilaksan akan (kali)	10	14,802,000	0	-	0	-	10	14,802,000		
		1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	0	0	100	76,932,500	0	-	100	76,932,500		



							akan (dokumen)												
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	0	0	0	-	1	80,779,100	1	80,779,100				
							Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan akan (kali)	10	28,149,000	0	-	0	-	10	28,149,000				
							Jumlah pelayanan promosi kesehatan yang dilaksanakan akan (dokumen)	0	-	100	58,240,000	0	-	100	58,240,000				
							Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	0	-	0	-	1	61,152,000	1	61,152,000				
	1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)													



						Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan akan (kali)	100	44,500,000	0	-	0	-	100	44,500,000		
	1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	0	-	100	55,958,000	0	-	100	55,958,000		
						Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	0	-	0	-	1	58,755,900	1	58,755,900		
						Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan akan (kali)	10	14,029,000	0	-	0	-	10	14,029,000		
	1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	0	0	100	32,350,000	0	-	100	32,350,000		



						Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	0	0	0	-	1	33,967,500	1	33,967,500
						Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan akan (kali)	10	39,297,710	0	-	0	-	10	39,297,710
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah pelayanan promosi kesehatan yang dilaksanakan akan (dokumen)	0	0	100	26,262,000	0	-	100	26,262,000
						Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (Dokumen)	0	0	0	-	1	27,575,100	1	27,575,100
						Jumlah kegiatan Germas yang dilaksanakan akan (kali)	10	29,789,000	0	-	0	-	10	29,789,000



						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (puskesmas)	6	19,328,000	0	-	0	-	6	19,328,000		
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya yang dilaksanakan	0		0	0	0	-	0	-		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan	0	-	0	0	6	65,000,000	6	65,000,000		



							mandiri dan tradisional lainnya (dokumen)										
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Tertanggungjawab kasus KIPI pasca vaksinasi Covid 19	1000	193,117,950	0	0	0	-	100	193,117,950		
							Pengelolaan surveilans kesehatan (persentase)	0	0	100	104,675,000	0	-	100	104,675,000		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan (dokumen)	0	-	0	-	1	45,000,000	1	45,000,000		
	1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah pengelolaan surveilans kesehatan (kegiatan)	2	44,699,493	0	0	0	-	3	44,699,493		



						Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	0	0	0	0	-	100	-		
	1	2	2	2.02	2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	100	11,757,000	0	0	0	-	100	11,757,000		
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	0	100	0	0	-	100	-		
	1	2	2	2.02	2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA(UPTD PUSKESMAS TALAWI)	100	3,307,000	0	0	0	-	100	3,307,000		
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	-	0	0	0	-	0	-		
	1	2	2	2.02	2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	100	1,500,000	0	0	0	-	100	1,500,000		



							(persentase)											
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	-	0	0	0	-	0	-			
		1	2	2	2.02	2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	100	1,800,000	0	0	0	-	100	1,800,000			
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	-	0	-				
		1	2	2	2.02	2.3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	78	54,848,000	0	0	0	-	78	54,848,000			
							Jumlah anak CP dan ABK yang mendapatkan pelayanan kesehatan (persentase)	0	0	80	20,000,000	0	-	80	20,000,000			



						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus (dokumen)	0	-	0	-	2	65,000,000	2	65,000,000
1	2	2	2.02	2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	13	224,505,777	0	-	0	-	13	224,505,777
						Persentase penyakit menular dan tidak menular yang tertangani	92		0		0		92	-
						Jumlah tertanggulangnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0		100	542,378,000	0	-	100	542,378,000



						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	0	-	0	-	1	148,500,000	1	148,500,000		
1	2	2	2.02	2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (kegiatan)	10	74,845,000	0	-	0	-	10	74,845,000		
						Jumlah tertanggungnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0	-	100	64,050,000	0	-	100	64,050,000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan	0	-	0	-	1	67,252,500	1	67,252,500		



						penyakit menular dan tidak menular (dokumen)												
1	2	2	2.02	2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (kegiatan)	10	65,650,000	0	-	0	-	10	65,650,000				
						Jumlah tertanggungnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0	-	100	21,800,000	0	-	100	21,800,000				
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	0	-	0	-	1	22,890,000	1	22,890,000				



							Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (kegiatan)	10	46,884,000	0	-	0	-	10	46,884,000
1	2	2	2.02	2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)		Jumlah tertanggungnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0	-	100	75,736,000	0	-	100	75,736,000
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	0	-	0	-	1	79,522,800	1	79,522,800
1	2	2	2.02	2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPTD PUSKESMAS TALAWI)		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	10	62,730,400	0	-	0	-	10	62,730,400



							Menular											
							Jumlah tertanggungnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0	-	100	91,673,000	0	-	100	91,673,000			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	0	-	0	-	1	96,256,650	1	96,256,650			
		1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	10	47,336,940	0	-	0	-	10	47,336,940			
							Jumlah tertanggungnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0	-	100	60,095,000	0	-	100	60,095,000			



						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	0	-	0	-	1	63,099,750	1	63,099,750		
1	2	2	2.02	2.5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10	48,553,000	0	-	0	-	10	48,553,000		
						Jumlah tertanggungnya penyakit menular dan tidak menular (persentase)	0	-	100	69,400,000	0	-	100	69,400,000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular	0	-	0	-	1	72,870,000	1	72,870,000		



							dan tidak menular (dokumen)										
	1	2	2	2.02	2.06	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Dibayarkannya jaminan BPJS ketenagakerjaan pegawai honor dan kontrak (bulan)	12	11,884,141,200	12	9,137,795,650	0	-	12	21,021,936,850		
							Dibayarkannya jaminan kecelakaan kematian pegawai honor dan kontrak (bulan)	12				0		12			
							Dibayarkannya jaminan kecelakaan kerja pegawai honor dan kontrak (bulan)	12				0		12			
							Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Sawahlunto (orang)	20000				0		41000			



							Jumlah peserta jaminan kesehatan Sumbar Sakato (orang)	13003	0	13003				
							Persentase cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN (persen)	16		16				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	0	-	0	4	12,029,781,200	4	12,029,781,200
1	2	2	2.02	2.06	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPTD PUSKESMAS KOLOK)		Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani (orang)	5958	401,389,010	6110	352,348,640	0	12068	753,737,650
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan kesehatan	0	-	0	1	407,393,196	1	407,393,196



							Masyara kat Puskesm as Kolok (dokume n)											
		1	2	2	2. 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah peserta jaminan kesehata n nasional yang terlayani (orang)	1 0 1 5 2	687,745,089	1041 2	559,807,550	0	-	2056 4	1,247,552,639		
							Jumlah dokumen hasil Pengelolan jaminan keshehat an Masyara kat Puskesm as Sungai Durian (dokume n)		0	-	0	-	1	613,118,310	1	613,118,310		
		1	2	2	2. 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah peserta jaminan kesehata n nasional yang terlayani (orang)	9 1 7 2	718,404,480	9407	613,407,810	0	-	1857 9	1,331,812,290		



						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat Puskesmas Silungka ng (dokume n)	0	-	0	-	1	657,615,462	1	657,615,462		
1	2	2	2.02	2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah peserta jaminan kesehata n nasional yang terlayani (orang)	16674	1,764,643,591	17101	1,168,388,150	0	-	33775	2,933,031,741		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan keshehat an Masyara kat Puskesmas Talawi (dokume n)	0	-	0	-	1	1,290,582,762	1	1,290,582,762		
1	2	2	2.02	2.6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah peserta jaminan kesehata n nasional yang terlayani	7868	455,554,342	8070	400,641,348	0	-	15938	856,195,690		



						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Pengambilan dan pengiriman an spesimen penyakit potensial KLB (persentase)	100	-	100	0	0	-	100	-		
		1	2	2	2.02	28		25	3,000,000	0	0	0	-	25	3,000,000		
		1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman an Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (sampel)									
		1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman an Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100	-	1,000,000	7	1,050,000	7	2,050,000		



							Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional (sampel)	25	2,075,000	0	-	0	-	25	2,075,000		
		1	2	2	2.02	28	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional	0	-	100	1,950,000	13	2,047,500	13	3,997,500		
		1	2	2	2.02	28	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional	100	-	100	2,000,000	14	2,100,000	14	4,100,000		



							baik (bulan)												
							Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas (bulan)	0	-	12	138,145,116	0	-	12	138,145,116				
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kolok (dokumen)	0	-	0	-	12	110,000,000	12	110,000,000				
	1	2	2	2.02	3	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan)	1 2	928,020,142	0	-	0	-	12	928,020,142				
							dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer	1 2		0		0		12					
							Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas (bulan)	0	0	12	110,713,140	0	-	12	110,713,140				



						Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Durian (dokumen)	0	-	0	-	12	116,248,797	12	116,248,797		
1	2	2	2.02	3	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan)	12	984,833,976	0		0		12	984,833,976		
						dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer	13		0		0		13			
						Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas (bulan)	0	-	12	112,405,080	0	-	12	112,405,080		
						Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Silungka	0	-	0	-	12	177,645,588	12	177,645,588		



							ng (dokume n)											
	1	2	2	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Terlaks nanya kegiatan operasio nal puskesm as dengan baik (bulan)		1 2	-	0	-	0	-	12	-		
							dibayark annya honor pegawai kontrak dan honorer		1 3	-	0	-	0	-	13	-		
							Jumlah Operasio nal Pelayana n Puskesm as (bulan)		1 2	1,045,727,404	12	202,442,400	0	-	12	1,248,169,804		
							Jumlah dokumen Operasio nal Pelayana n Puskesm as Talawi (dokume n)		0	-	0	-	12	207,120,000	12	207,120,000		
	1	2	2	2.	3	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Terlaks nanya kegiatan operasio nal puskesm as		1 2	879,452,947	0	-	0	-	12	879,452,947		



							dengan baik (bulan)											
							dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer	13	0		0		13					
							Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas (bulan)	0	0	12	91,609,000	0	-	12	91,609,000			
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Kp Teleng (dokumen)	0	-	0	-	12	125,608,000	12	125,608,000			
	1	2	2	2.02	3	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan baik (bulan)	12	640,140,852	0	-	0	-	12	640,140,852			
							dibayarkannya honor pegawai kontrak dan	13		0		0		13				



							honorer											
							Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas (bulan)	0	0	12	59,409,012	0	-	12	59,409,012			
							Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lunto (dokumen)	0	-	0	-	12	89,907,000	12	89,907,000			
	1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dibayarkan honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	13	1,670,483,112	0	-	0	-	13	1,670,483,112			
							Jumlah puskesmas dan dinas yang menyelenggarakan bantuan operasional kesehatan	7		0		0		7				
							Jumlah puskesmas mengelola limbah medis/b3 sesuai standar	6		0		0		6				



							Jumlah terlaksananya pelayanan hari libur lebaran dan pelayanan kesehatan even daerah/nasional (P3K) (laporan)	1 2	-	4	22,820,000	0	-	16	22,820,000		
							Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (dokumen)	0	-	0	-	2	53,550,000	2	53,550,000		
	1	2	2	2.02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	1 3	137,895,740	0	-	0	-	13	137,895,740		
							jumlah distribusi obat dan e logistik (bulan)	1 2		0		0		12			



						Terlaksananya kegiatan operasional instalasi farmasi kota dengan baik (bulan)	1 2	0	0	12				
						Jumlah terlaksananya kegiatan operasional IFK dengan baik	0	0	12	68,620,000	0	-	12	68,620,000
						Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (dokumen)	0	-	0	-	12	200,731,000	12	200,731,000
		1	2	2	2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	1 0 0	372,569,000	0	-	0	-	100	372,569,000
						Jumlah Puskesmas Yang Akan di Re Akreditasi	2	-	4	144,720,000	0	151,956,000	6	296,676,000



						(puskes mas)													
1	2	2	2.02	3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPTD PUSKESMAS KOLOK)	Jumlah Investi gasi Awal Kejadian Tidak Diharap kan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas i dan Pemberia n Obat Massal) (kasus)	5	500,000	100	500,000	5	525,000	10	1,525,000					
1	2	2	2.02	3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN)	Jumlah Investi gasi Awal Kejadian Tidak Diharap kan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas i dan Pemberia n Obat Massal) (kasus)	5	3,750,000	100	1,000,000	5	1,050,000	10	5,800,000					
1	2	2	2.02	3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG)	Jumlah Investi gasi Awal Kejadian Tidak Diharap kan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisas i dan	5	500,000	100	500,000	5	525,000	10	1,525,000					



							Pemberian Obat Massal) (kasus)											
	1	2	2	2.02	3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPTD PUSKESMAS TALAWI)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kasus)	5	150,000	100	650,000	5	682,500	10	1,482,500			
	1	2	2	2.02	3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kasus)	5	3,300,000	100	3,750,000	5	3,937,500	10	10,987,500			
	1	2	2	2.02	3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (kasus)	5	600,000	100	1,000,000	5	1,050,000	10	2,650,000			



							Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)												
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah tertanggungnya KLB/Wabah Penyakit Menular (persentase)	100	13,380,000	100	56,000,000	0	-	100	69,380,000					
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah (dokumen)	0	-	0	-	1	99,000,000	1	99,000,000					
1	1	2	2.02	38	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah penanggulangan gawat darurat (persentase)	100		100	239,476,700	0	-	100	239,476,700					
						Jumlah Public safety centre (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi	0	-	0	-	1	267,500,000	1	267,500,000					



							dengan rumah sakit dalam satu sistem penangan gawat darurat terpadu (SPGDT) (Unit)										
		1	2	2	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			148,110,550		81,760,000		129,450,000		359,320,550	
		1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	0	1	112,233,800	1	33,760,000	0	-	1	145,993,800
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan (dokumen)		0	-	0	-	3	90,950,000	3	90,950,000
		1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase keluarga sehat		31	35,876,750	0	-	0	-	31	35,876,750



						Terlaksananya belanja modal alat sistem informasi (paket)	0	0	0	1	48,000,000	0	-	1	48,000,000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan		0	-	0	-	2	38,500,000	2	38,500,000		
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			250,016,000		28,358,350		178,114,000		456,488,350		
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			4,106,250		0		34,730,000	0	38,836,250		
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			4,106,250		0	0	0	0	4,106,250		



									121,934,250		4,668,400		37,500,000		164,102,650			
		1	2	4	2													
		1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan , minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan (persenta	79	121,934,250	79	4,668,400	0	-	79	126,602,650		



							(TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (dokumen)										
		1	2	4	2.1		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			3,261,000		8,383,000		20,790,000		32,434,000	
		1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tindak Lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan (persentase)	91	3,261,000	91	8,383,000	0	-	91	11,644,000	



						Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan (dokumen)	0	-	0	-	2	20,790,000	2	20,790,000
		1	2	4	2.1	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			89,775,000		7,400,000	22,594,000		119,769,000
		1	2	4	2.06	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	91	89,775,000	92	7,400,000	0	-	92	97,175,000



								286,104,000				9,000,000				85,000,000				380,104,000
1	2	5	2		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1	2	5	2	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah anggota pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan (orang)	1 2 0	286,104,000	0	9,000,000	0	-	120	295,104,000						
					Jumlah kebijakan yg mendukung PHBS (buah)	2							2							
					Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan (kali)	4			0	-	0	-	4	-						
					Jumlah ormas dan dunia usaha yang bermitra (buah)	3							3							



						Jumlah terfasilitasi kegiatan komisi penanggulangan HIV/AIDS (laporan)	1	0	-	0	-	1	-	
						Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)	0	-	0	-	1	85,000,000	1	85,000,000
	1	2	5	2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		111,040,000		22,830,000		75,000,000		208,870,000
	1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	111,040,000	5	22,830,000	0	9	133,870,000	
						Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan (kali)			1		0	2		
						Jumlah kegiatan HKN yang dilaksanakan (kali)	1							



						Jumlah Desa / kelurahan yg melaksanakan KKG PKK KB Kes (desa/kel)	4	0	0	-	4			
						Jumlah kategori posyandu yang dinilai (kategori)	6	0	0	-	6			
						Jumlah Dokter kecil dan KKR yang dilatih (orang)	995	995	0	-	995	-		
						Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	0	-	0	-	1	55,000,000	1	55,000,000



		1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KOLOK	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif (persentase)	100	-	100	33,591,000	0	-	100	33,591,000		
								Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	0	-	0	-	1	35,270,550	1	35,270,550		
		1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUNGAI DURIAN	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif (persentase)	100	-	100	18,055,000	0	-	100	18,055,000		



						Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	0	-	0	-	1	18,957,750	1	18,957,750
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SILUNGKANG	Jumlah desa/keurahan siaga aktif (persentase)	100	-	100	30,325,000	0	-	100	30,325,000
						Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	0	-	0	-	1	31,841,250	1	31,841,250



							Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)												
	1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TALAWI	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif (persentase)	100	-	100	17,352,000	0	-	100	17,352,000				
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	0	-	0	-	1	18,219,600	1	18,219,600				



						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KP. TELENG	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif (persentase)	100	-	100	16,991,000	0	-	100	16,991,000		
							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	0	-	0	-	1	17,840,550	1	17,840,550		
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LUNTO	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif (persentase)	100	-	100	16,333,400	0	-	100	16,333,400		



							Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (dokumen)	0	-	0	-	1	17,150,050	1	17,150,050
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		4,862,192,955		3,144,675,597		18,924,901,438		26,931,769,990	
	1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,789,463,955		3,077,978,447		18,729,901,438		26,597,343,840	



		1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0	0	-	0	0	1	11,000,000,000	1	11,000,000,000		
		1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang dibangun	2	2	740,729,645		0		0	2	740,729,645		
		1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan	1	0	-	0	0		0	0	-		
		1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0	0	-		0		0	0	-		
								Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas (unit)	0	0	-	0	0	3	400,000,000	3	400,000,000		



							Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (fasyankes)	37	2	904,556,160		0	1	900,000,000	2	1,804,556,160	
							Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibiayai dana fikiran (fasyankes)		1			0	0	0	1	-	
							Jumlah ketersediaan alat kedokteran/kesehatan (paket)		7	720,839,400	0	0	0	0	72	720,839,400	
							Jumlah ketersediaan alat kedokteran/kesehatan (persentase)	52	0	0	94%	1,275,579,897	0%	-	94%	1,275,579,897	



						Jumlah alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)	0	0	-	0%	-	10	1,742,550,000	10%	1,742,550,000		
	1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	1	90,000,000	0%	-	0	-	1%	90,000,000		
						Jumlah Alat Kalibrasi yang diadakan dan di kalibrasi	0	0	-		0		0	0	-		
						Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan (unit)	0	0	-	0	0	200	125,000,000	200	125,000,000		
	1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		1	901,029,393	0	0	0	-	1	901,029,393		
						Jumlah ketersediaan obat dan vaksin (paket)											



							Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator puskesmas	91	0	0	91	-					
							Jumlah ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas (persentase)	0	0	94	771,830,000	0	0	94	771,830,000		
							Jumlah obat dan vaksin yang disediakan (Paket)	0	-			1	1,072,080,863	1	1,072,080,863		
		1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	91	1,283,802,357	94	888,972,000	0	-	94	2,172,774,357		
							Jumlah ketersediaan obat dan vaksin indikator (persentase)										
							Jumlah ketersediaan BMPH (paket)	1		0	-	0	-	1	-		
							Jumlah bahan habis pakai yang disediakan (Paket)	0	-	0	-	1	1,175,970,600	1	1,175,970,600		



		1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	13	57,775,000	13	-	0	-	13	57,775,000		
								Jumlah alat kedokteran yang dipelihara (jenis)	24	-	26	74,347,350	0	-	26	74,347,350		
								Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)	0	-	0	-	100	181,912,500	100	181,912,500		
		1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medik Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Jumlah Distribusi obat dan BMHP (bulan)	0	0	12	67,249,200	12	932,387,475	12	999,636,675		
								Terlaksananya distribusi alat kesehatan (bulan)	12	49,882,000	0	-	0	-	12	49,882,000		



		1	2	2	2			72,729,000		66,697,150		195,000,000		334,426,150		
		1	2	2	2.04	3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang berprestasi	1	9,729,000	0	-	0	-	1	9,729,000
								Jumlah tenaga kesehatan teladan	9	0	0	0	9			
								Jumlah terlaksananya kegiatan pelayanan publik unggulan (kegiatan)	0	0	1	56,503,250	0	-	1	56,503,250
								Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan (jumlah)	0	-	0	-	6	145,000,000	6	145,000,000



	1	0	03	2.	0	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan (dokumen)	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	0	-	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000
	1	0	0	2.	0	Perencanaan Kebutuhan dan Penddayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			368,750,000		50,400,000.00		72,920,000		492,070,000
	1	0	03	2.	0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	0	-	0	-	4	20,000,000	4	20,000,000
	1	2	3	2.	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	dibayarkannya insentif tenaga kesehatan non pns dalam penanga	1	300,000,000	0	-	0	-	12	300,000,000



					BERENCANA)	nan Covid 19												
								0	0	0	-	0	0	0	-			
								1	8,400,000		-	0	0	2	8,400,000			
								1	8,400,000		9,600,000	1	10,080,000	2	28,080,000			
								1	8,400,000		-	0	0	1	8,400,000			
								2	16,800,000		28,800,000	3	30,240,000	5	75,840,000			



							(orang)											
	1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG)	Jumlah pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar (orang)	1	8,400,000	1	0	0	0	2	8,400,000			
	1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (UPTD PUSKESMAS LUNTO)	Jumlah pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar (orang)	1	8,400,000	1	12,000,000	1	12,600,000	3	33,000,000			
	1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Persentase Sumber Daya manusia Kesehatan yang dilatih dalam penggunaan obat yang rasional	71	9,950,000	0	-	0	-	71	9,950,000			
							Jumlah pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	0	-	0	0	0	0	0	-			



		1	2	3	2			783,950,000		-		132,231,000		916,181,000		
		1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)	Jumlah Dokter dan Bidan terlatih APN sesuai standar		10				783,950,000		
								Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan akan (Kali)		2						
								Jumlah petugas yang memiliki sertifikat		12						



Menurunkan prevalensi stunting	Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana	2																
		2	14															
		2	14	2				40,999,000		165,265,000		119,895,000		326,159,000				
		2	14	2	2					85,000,000		64,000,000		149,000,000				



		2	1 4	2	2. 01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	0	0	-	1	85,000,000	0	-	1	85,000,000
								Jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten Kota (dokumen)		0	-	0	-	1	30,000,000	1	30,000,000
		2	1 4	0 2	2. 0 1	0 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		0	-	0	-	3	34,000,000	3	34,000,000



									40,999,000		80,265,000		55,895,000		177,159,000		
		2	1 4	2	2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
		2	1 4	2	2. 02	1	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data keluarga yang dihasilkan (KK)	0	-	213	1,065,000	0	-	213	1,065,000	
		2	1 4	2	2. 02	1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru	1 9 0 0 0	40,999,000	0	0	0	1900 0	40,999,000		
								Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga (Laporan)	0	-	0	0	1	55,895,000	1	55,895,000	
		2	1 4	2	2. 02	1	Pengolahan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan yang dihasilkan (laporan)	0	-	24	79,200,000	0	-	24	79,200,000	
		2	1 4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1,876,254,400		2,488,503,000		159,950,000		4,524,707,400	



							1,775,974,800		364,415,000		42,500,000		2,182,889,800		
2	1 4	3	2		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal										
2	1 4	3	2. 01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mengikut i kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	
						Jumlah stakehol der dan mitra kerja yang difasilita si (peserta)	0	0	-	35	4,375,000	0	-	35	4,375,000
						Jumlah organisa si yang mendapa tkan advokasi program bangga kencana (Pemban gunan keluarga, kependu dukan, dan keluarga berencan a) kepada	0	-	0	-	40	15,000,000	40	15,000,000	



							stakeholders dan mitra kerja (Organisasi)										
	2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah jenis media yang diadakan (media/KIE)	37	37	5,288,000	3	25,000,000	0	-	37	30,288,000	
							Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal (dokumen)		0	-	0	-	4	27,500,000	4	27,500,000	
	2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	Jumlah jenis media yang diadakan		0	-	3	70,640,000	0	-	3	70,640,000	
	2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi camat (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan miniloka karya (minilok)	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan (kali)		0	-	12	62,400,000	0	-	12	62,400,000	



		2	1 4	3	2. 01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah balai penyuluhan dan gudang alkon yang difasilitasi	5	1,770,686,800	0	0	5	1,770,686,800		
								Jumlah paket yang dilaksanakan akan	5		0	0	5			
								Jumlah balai penyuluhan KB yang difasilitasi	0	-	4	162,000,000	4	162,000,000		
		2	1 4	3	2. 01	8	Pengendalian Program KKBPk	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan akan (kali)	0	-	12	40,000,000	12	40,000,000		
		2	1 4	3	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			89,175,000		177,600,000		45,000,000		311,775,000
		2	1 4	3	2. 02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kader KB yang difasilitasi	2 3 5	89,175,000	0	-	235	89,175,000		



							Jumlah laporan hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan pelayanan dan pengembangan Program KKBPk Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana /Penyuluhan Lapangan keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	-	0	-	4	45,000,000	4	45,000,000			
		2	14	3	2.02	4	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang difasilitasi (kader IMP)		-	235	177,600,000	0	-	235	177,600,000		



							Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya (laporan)	0	-	0	-	12	72,450,000	12	72,450,000		
		2	1 4	3	2		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	0	-		207,000,000		-		207,000,000		
		2	1 4	3	2. 04	3	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	-	12	207,000,000	12	-	12	207,000,000		



		2	1 4	4				57,454,000		323,880,000		192,830,000		574,164,000			
		2	1 4	4				57,454,000		323,880,000		192,830,000		574,164,000			
		2	1 4	4	2			57,454,000		323,880,000		192,830,000		574,164,000			
		2	1 4	4	2. 01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok BKR dan BKL yang Terbina		3 7	-	0	-	0	37	-	
							Jumlah PIK-R yang Terbina			2 3	0	0	23				
							Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang terbentuk	148	1 4 8		-	0	0	148	-		



							jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), usat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk (kelompok)	0	-	0	0	37	42,830,000	37	42,830,000	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	----	------------	----	------------	--



		2	1	4	2.	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader KB yang dibina dan terampil	85	-	0	0	0	-	85	-		
			4		01			Jumlah kader Ketahanan Keluarga terlatih	444	444	-	0	-	-	444	-		
								Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Orang)	0	-	0	-	85	55,000,000	85	55,000,000		



		2	1	4	2.	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah catin, ibu hamil, ibu melahirkan yg didampingi (orang)	444		-	3028	316,880,000	0	-	3028	316,880,000		
								Jumlah tenaga kader / pendamping yang dibiayai (orang)				150		0		150			
		2	1	4	2.	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta /duta gendre yang ikut dalam kompetisi pemilihan duta gendre (peserta)	148	6	57,454,000	60	7,000,000	0	-	60	64,454,000		
								Jumlah peserta/ keluarga yang berpartisipasi dalam peringatan hari keluarga nasional (Hargana) (peserta)		1		400		0		1400			



						Jumlah peserta sakaencana yang menjadi anggota dan dibina (peserta)	60	30	0	60				
						Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PP, PKS, PIK-R dan Pemberdayaan) Ekonomi Keluarga /UPPKS	0	-	0	-	3	95,000,000	3	95,000,000
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28,920,281,448	#####		36,095,227,500		94,887,444,242
		1	2	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26,969,280,677	#####		29,247,159,073		81,156,937,466



		1	0	01	2.	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian BMD (laporan)	0	0	-	0	-	1	12,000,000	1	12,000,000		
		1	0	01	2.	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD yang dihasilkan (Laporan)	0	0	-	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000		
		1	2	1	2.	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				421,821,200		224,024,000		407,514,010		1,053,359,210		
		1	2	1	2.	1	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen kelistrikan yang disediakan (bulan)	12	1	7,525,000	12	12,824,000	0	-	12	20,349,000		
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	0	0	-	0	-	4	20,406,730	4	20,406,730		



							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	0	0	-	0	-	3	32,553,580	3	32,553,580			
		1	2	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah biaya fotocopy , barang cetakan dan penjilidan (bulan) yg disediakan (bulan)	12	12	21,000,000	12	22,000,000	0	-	12	43,000,000		
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	0	0	-	0	-	2	35,000,000	2	35,000,000			
		1	0	01	2.06	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar (jenis)		2	3,270,000	0	-	0	-	2	3,270,000		
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	0	0	-	0	-	2	5,947,700	2	5,947,700			



							(dokumen)											
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar provinsi (bulan)	12	12	113,785,000	12	119,570,000	0	-	12	233,355,000			
						Tersedianya gas elpiji dan oksigen (bulan)	0	12	0	0	0	12						
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (laporan)	0	0	-	0	-	12	173,206,000	12	173,206,000			
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				32,900,000				504,029,417		536,929,417			
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang yang diadakan (paket)		1	20,000,000	0	-	0	-	1	20,000,000			
						Jumlah barang yang diadakan (persentase)		100		0		0		100				



							Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	0	0	-	0	-	2	379,029,417	2	379,029,417
		1	0	01	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9	12,900,000	0	-	0	-	93	12,900,000
							Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	9	125,000,000	9	125,000,000
		1	2	1	2.	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235,921,221		3,555,607,628		3,969,600,000		7,761,128,849
		1	2	1	2.	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	72,345,000	0	1,649,700	0	-	13	73,994,700
							dibayarkannya honor pegawai kontrak dan		3							



							honorer													
							Jumlah materai yang tersedia (lembar)		0		350		0		350					
							Jumlah pengiriman yg terfasilitasi (bulan)	12	0		12		0		12					
							Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	0	0	-	0	-	12	10,000,000	12	10,000,000				
	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan (bulan)	12	12	163,576,221	12	213,157,928	0	-	12	376,734,149				
							Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	0	0	-	0	-	36	275,000,000	36	275,000,000				



							Jumlah Gaji yang dibayarkannya gaji pegawai honor dan kontrak (bulan)	13	0	-	13	3,340,800,000	0	-	13	3,340,800,000		
	1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan (Laporan)	0	0	-	0	-	12	3,684,600,000	12	3,684,600,000		
	1	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,260,358,350		1,151,805,950		1,837,400,000		4,249,564,300		
	1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer		13	963,351,000	13	750,420,000	0		13	1,713,771,000		
						Terpeliharanya kendaraan dinas (unit)		0	181		181		0		181			



							Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	0	0	-	0	-	187	1,025,000,000	187	1,025,000,000
		1	0	01	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		1	220,000,000	0	-	0		1	220,000,000
							jumlah sarana kesehatan yang direhap (pustu)		1		0		0		1	
							Terpeliharanya gedung kantor (paket)		1		0		0		1	
							Terpeliharanya rumah dinas (unit)		1		0		0		1	
							Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direha	0	0	-	0	-	4	750,000,000	4	750,000,000



							bilitasi (Unit)										
	1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dibayarkannya honor pegawai kontrak dan honorer (bulan)	13	13	77,007,350	0	-	0	-	13	77,007,350	
							Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (bulan)	12	0	-	12	401,385,950	0	-	12	401,385,950	
							Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	0	0	-	0	-	50	62,400,000	50	62,400,000	
	1	02	01	2.10	01	Peningkatan Pelayanan BLUD				-					97,525,000	97,525,000	
	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang	0	0	-	0	-	6	97,525,000	6	97,525,000	



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021 sampai dengan 2023 Perangkat Daerah
RSUD Sawahlunto
Kota Sawahlunto (setelah perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	2	2			22,681,000,000		23,014,000,000		50,188,000,000		95,883,000,000		
		1	2	2	201	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		22,384,000,000		22,703,000,000		49,864,000,000		94,951,000,000	



		1	0	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	1	150,000,000	1	650,000,000	3	12,000,000,000	5	12,800,000,000		
		1	0	0	2	1	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0	-	0	-	3	9,200,000,000	3	9,200,000,000		
		1	0	0	2	1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000		
		1	0	0	2	1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	1	8,148,000,000	1	1,783,000,000	1	5,000,000,000	3	14,931,000,000		
		1	0	0	2	1	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0	0	-	1	4,000,000,000	1	4,400,000,000	2	8,400,000,000		
		1	0	0	2	1	Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2	3	13,012,000,000	3	13,048,000,000	4	13,298,000,000	10	39,358,000,000		



				1 2 2 0 1	2 0 8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	0	1	150,000,000	2	2,558,000,000	3	2,611,000,000	6	5,319,000,000		
				1 2 2 0 1	2 0 9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	24	24	100,000,000	12	100,000,000	24	55,000,000	60	255,000,000		
				1 2 2 0 1	2 0 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	1	174,000,000	1	39,000,000	1	250,000,000	3	463,000,000		
				1 2 2 0 2	2 0 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0	1	650,000,000	1	525,000,000	1	550,000,000	3	1,725,000,000		
				1 2 2 0 2	2 0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				297,000,000		311,000,000		324,000,000		932,000,000		
				1 2 2 0 4	2 0 4	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	12	297,000,000	12	311,000,000	12	324,000,000	12	932,000,000		



			1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	1,333,000,000	12	1,481,000,000	12	1,645,000,000	36	4,459,000,000		
			1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1,844,000,000	12	2,049,000,000	12	2,277,000,000	36	6,170,000,000		
			1	2	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				610,000,000		678,000,000		753,000,000		2,041,000,000		
			1	0	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RSUD Sawahlunto)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	610,000,000	12	678,000,000	12	753,000,000	36	2,041,000,000		
			1	0	0	2	0	Peningkatan Pelayanan BLUD				31,972,000,000		33,570,000,000		35,248,000,000		100,790,000,000		
			1	0	0	2	0	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (RSUD Sawahlunto)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan (Unit Kerja)	12	12	31,972,000,000	12	33,570,000,000	12	35,248,000,000	12	100,790,000,000		



Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah disesuaikan dengan Permendagri tersebut, berdasarkan dari Renstra sebelum perubahan selain adanya perbedaan Tujuan, Sasaran, dan Indikator pada Renstra, kegiatan dan sub kegiatan juga mengalami perubahan, hal ini disebabkan adanya Perubahan Renstra Provinsi Sumatera Barat pada Tahun ke-3 tahun berjalan karna adanya pergantian Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Periode 2016-2021 ke periode 2021-2026. Sehingga Renstra Kabupaten/Kota mengalami Perubahan mengikuti Renstra Provinsi Sumatera Barat dan tetap berpedoman kepada Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Pada Kegiatan dan sub kegiatan di RPJMD Renstra perubahan ini, ruang lingkupnya lebih besar dan luas dan lebih menekankan kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian program prioritas dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) sehingga diharapkan dengan adanya perubahan kegiatan dan sub kegiatan ini, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya Kota Sawahlunto sesuai dengan tujuan dari RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.



BAB VII

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto yang secara langsung menunjukkan kinerja akan dicapai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel 7.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Kota Sawahlunto (sebelum perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2017)	CAPAIAN KINERJA TAHUN								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		95	97,8	102	95	98,1	103	86	76.5	89
2	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi		95	68	71,5	93	76,3	80,1	95	59	62.1
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun		28	18,6	2,9	28	7,6	173	26.8	5.4	179
4	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)		90	90	100	90	90,2	101	94	94	100
5	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)		78	85	108,9	78	92,2	1018,3	81	91	112
6	Persentase sarana produksi makanan yang sesuai standar		90	90	100	90	90,95	97,7	91	88	92,2
7	Persentase sarana distribusi obat dan makanan sesuai standar		90	70	77,78	91	90,2	99,12	91	88,5	95,6
8	Indeks keluarga Sehat		26	24	92	29	24,6	84,6	50	24	48
9	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun		2,1	2,3	90,48	2,38	2,23	106%	2.33	2.027	113
10	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar		94	82,4	87,6	94	84,23	89,60	95	92.6	97.5



11	Persentase sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar		73	70	91,5	73	71,63	98,2	75	74	98.7
12	Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas		94	79,3	84,6	94,66	81,36	85,9	82.8	80.6	97.3
13	Persentase Kepesertaan JKN		95	96,8	99,49	95	97,1	101%	96	96.07	100.1

Dari indikator RPJMD tahun 2018-2023 sebelum perubahan terdapat sebagian besar indikator sudah mencapai target antara lain

1. Persalinan difasilitas pelayanan kesehatan
2. Prevalensi stunting pada anak dibawah dua tahun
3. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)
4. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)
5. Sarana produksi makanan yang sesuai standar
6. Indeks Keluarga Sehat
7. Sarana distribusi obat dan makanan sesuai standar
8. Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar
9. Persentase kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
10. Sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar
11. Angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator yaitu adanya kesinambungan antar kegiatan satu dengan yang lainnya, seperti indeks keluarga sehat mempunyai 12 indikator, dan target indikator keluarga sehat sudah mencapai target pada indikator yang terdapat pada RPJMD, antara lain persalinan difasilitas pelayanan kesehatan, rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum layak (SDGs) dan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs) dan kedua indikator ini mendukung dalam pencapaian penurunan prevalensi stunting pada anak. Selain itu Sarana prasarana juga mempengaruhi dalam pencapaian target indikator, setiap tahun akan dilaksanakan mapping terhadap sarana prasarana yang ada sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam mendukung pencapaian kualitas pelayanan tersebut terdapat 2 aliran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto dan Dana Alokasi Khusus (DAK),



Beberapa indikator lainnya pada indikator RPJMD tahun 2018-2023 yang belum mencapai target antara lain:

1. Imunisasi dasar lengkap

Faktor –faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap adalah faktor sosial dan keagamaan mengenai isu kehalalan vaksin sehingga mengurangi minat orang tua untuk melakukan imunisasi pada anaknya.

2. Tingkat kepuasan pasien

jika dikaitkan dengan kualitas pelayanan, di setiap Puskesmas sudah terdapat Kotak Pengaduan Masyarakat/ Kota Saran bahkan untuk pengaduan bisa langsung via sms/wa ke puskesmas yang bersangkutan, sehingga dapat menjadi evaluasi bagi Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas.



Tabel 7.2

Rencana Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Kota Sawahlunto (setelah perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2020)	TARGET TAHUN			
			2021	2022	2023	Kondisi akhir renstra
(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	69.83	70.14	70.28	70.42	70.42
2	Jumlah Kasus Kematian Bayi	22	19	18	18	18
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan	3	0	0	0	0
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0.3	7,8	7,5	7,3	7,3
5	Jumlah Kasus Kematian Balita	27	0	0	0	0
6	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100
8	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	0.0022	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014
9	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terkredetasi	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
10	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil	100	100	100	100	100
11	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100
12	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100
13	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	74	77	78	79	79
14	Persentase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100	100



15	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100	100
16	Persentase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar	38.1	70	71	72	73
17	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100	100
18	Persentase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100	100	100	100
19	Persentase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100	100	100	100	100
20	Persentase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar	100	100	100	100	100
21	Persentase orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar	100	100	100	100	100
22	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	11.1	6,1	3,78	2,65	2,65
23	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 Tahun	2.38	2.29	2.25	2.22	2.22
24	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/mCPR)	64	67.78	68.55	69.21	69.21
25	Persentase Unmeet need (Kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi)	19.31	15.97	14.6	13.4	13.4

Dari 12 indikator yang ada pada Indikator Kinerja Utama sebelum perubahan terdapat 2 indikator yang tidak mengalami perubahan yaitu Prevalensi Stunting dan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun. Dan indikator yang mengalami perubahan pada RPJMD tahun 2018-2023 antara lain:

1. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan



2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)
3. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)
4. Sarana produksi makanan yang sesuai standar
5. Indeks Keluarga Sehat
6. Imunisasi dasar lengkap (IDL)
7. Sarana distribusi obat dan makanan sesuai standar
8. Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar
9. Persentase sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar
10. Tingkat kepuasan pasien
11. Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Perubahan Indikator sebelum dan setelah perubahan RPJMD tahun 2018-2023 karna adanya pergantian Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Periode 2016-2021 ke periode 2021-2026, dengan adanya perubahan tersebut akan mempengaruhi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator pada RPJMD awal.



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Sebelum dan Setelah Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto yang terdapat pada rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan selaku Kementerian Teknis. Rencana Strategi Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan indikatif kurun waktu 2018-2023. Kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang sudah disusun, pelaksanaan renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

CASCADING PERUBAHAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SAWAHLUNTO

VISI Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera
 MISI Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat
 Tujuan RPJMD Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kota Sawahlunto

